

# **ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH PADA PROSES KEMITRAAN (SYIRKAH) ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT.GO-JEK INDONESIA**

## **SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD FIKRI**

**145020501111033**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

"Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan (Syirkah)  
antara *Driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia"

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Fikri  
NIM : 145020501111033  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **05 Juni 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Dias Satri, SE., M.App.Ec., Ph.D  
NIP. 19820807 200501 1 002  
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Iswan Noor, SE., ME  
NIP. 19590710 198303 1 004  
(Dosen Penguji I)
3. Aji Purba Trapsila, SE.I., ME.I  
NIP. 19840123 201504 1 002  
(Dosen Penguji II)

Malang, 05 Juni 2018  
Ketua  
Program Studi Ekonomi Islam,

Arief Hoetoro, SE., MT., PhD  
NIP. 197009221 995123 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Fikri**  
Tempat, tanggal lahir : **P.Terong, 11 April 1996**  
NIM : **145020501111033**  
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**  
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**  
Alamat : **Kerto Pamuji 42A, Ketawanggede, Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan (Syirkah) antara Driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,



Dias Satri, SE., M.App.Ec., PhD  
NIP. 19550815 198403 1 002

Malang, 24 Mei 2018

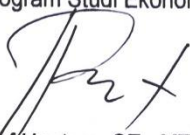
Yang membuat pernyataan,



ad Fikri

NIM. 145020501111033

Mengetahui,  
Ketua  
Program Studi Ekonomi Islam,



Arief Hoetoro, SE., MT., PhD  
NIP. 197009221 995123 1 002

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama Lengkap** : Muhammad Fikri

**Jenis Kelamin** : Laki-laki

**Tempat/Tanggal Lahir** : P.Terong/ 11 April 1996

**Agama** : Islam

**Alamat Email** : muhammadfikri150@gmail.com

**Pendidikan Formal** :

Sekolah Dasar (2002-2008) : SDN 007 Sekupang Batam

SMP (2008-2011) : SMP Negeri 20 Sekupang Batam

SMA (2011-2014) : SMA Negeri 1 Sekupang Batam

Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Brawijaya

**Pengalaman Organisasi** :

2015 – 2016 : Staff Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi

2016 – 2017 : Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan Personal  
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi

2017 – 2018 : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi

**Pengalaman Kepanitiaan** :

2015 : Staff Divisi Transkoper Communication Training (Comtrai) 2015



- 2015 : Staff Divisi Transkoper Transformer (Transition of New Student for Maximazing Economist Role) 2015
- 2016 : Kepala Divisi Liassion Officer (LO) Musyawarah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam 2016
- 2016 : Steering Committee Transformer 2016
- 2016 : Steering Committee Communication Training 2016
- 2018 : Committee 1<sup>st</sup> International Conference Rural Development 2018



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dipersyaratkan untuk mendapatkan derajat Sarjana Ekonomi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua dan segenap keluarga besar yang telah mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk kelancaran studi penulis. Terimakasih kepada para sahabat dan teman dekat penulis yang telah menjadi teman diskusi, selalu membantu dalam segala hal, selalu memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak Dias Satria, SE., M.App. Ec., Ph.D yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman Ekonomi Islam 2014 khususnya, teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi yang saling memberikan semangat dan dukungan, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Terakhir, penulis meminta doa dan dukungan kepada teman-teman untuk kelancaran dan kemudahan untuk kehidupan di masa depan penulis. Sekian.

## ABSTRAKSI

**Fikri, Muhammad. 2018. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan (*Syirkah*) antara *Driver* Go-Jek Indonesia dengan PT.Go-jek Indonesia. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dias Satria, SE., M.App. Ec., Ph.D**

Pada era digitalisasi, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai macam aktivitas masyarakat sudah mulai berputar dengan teknologi-teknologi canggih yang melengkapi kehidupan sosial, budaya, maupun cara seseorang mendapatkan pendapatnya. Bisnis online merupakan suatu alternatif yang cukup berpotensi dalam mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh (mubah). PT. Go-jek Indonesia adalah salah satu bisnis berbasis online yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif content analysis yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat kesesuaian dalam prinsip syariah pada proses kemitraan (*syirkah*) antara driver go-jek dengan PT.Go-Jek Indonesia dan terdapat hal yang kurang sesuai pada hal Surat Keterangan Kemitraan pada poin mengembalikan atribut perusahaan. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Perlu adanya ruang untuk para mitra (driver) agar dapat menyuarakan pendapat. Pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para driver dari adanya fake order. Maka dari itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam menjaga sistem agar tetap aman.

**Kata kunci:** *Syirkah*, Go-Jek, Kesesuaian, Kemitraan

## ABSTRACT

**Fikri, Muhammad. 2018. Conformity Analysis of Sharia Principles in the Partnership Process (Syirkah) between Indonesian Go-Jek Drivers and PT. Go-jek Indonesia. Thesis, Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Dias Satria, SE., M.App. Ec., Ph.D**

In the era of digitalization, all forms of activities carried out by the community will be related to the development of existing technology. Various kinds of community activities have begun to dwell on advanced technologies that complement social, cultural, and way of getting someone's opinion. Online business is an alternative that has enough potential to bring profits to business people. Business in Islamic sharia basically belongs to the category muamalat whose original law is permissible (mubah). PT. Go-jek Indonesia is one of the online-based businesses that are in great demand by the general public. This study uses a qualitative approach to content analysis that uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that there is a conformity in the sharia principles in the partnership process (syirkah) between the go-to driver and PT. Go-Jek Indonesia and there are things that are not appropriate in the case of the Partnership Certificate at the point of reversing the company atribut. There needs to be an improvement regarding the applicable SKK. There needs to be room for partners (drivers) to be able to voice opinions The importance of maintaining the security and operational continuity of the drivers from the existence of fake orders. Therefore it is necessary to have innovations in keeping the system safe.

**Keywords:** *Syirkah, Go-Jek, Conformity, Partnership*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan antara *Driver Go-Jek* dengan PT.Go-Jek Indonesia"**. Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Namun, berbagai kendala tersebut dapat diatasi berkat banyaknya bantuan dan dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis begitu besar yang tak terhingga.
2. Kedua orangtua, Bapak Abdul Basyid dan Ibu Sunariah, serta kakak dan adik-adik dari penulis yang selalu memberikan doa dan semangat bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi hingga selesai.
3. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Ibu Nurul Badriyah, SE., ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Bapak Arief Hoetoro, SE., MT., PhD selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

7. Bapak Dias Satria, SE., M.App. Ec., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran, dan membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Bapak Dr. Iswan Noor, SE., ME dan Bapak Aji Purba Trapsila, SE.I., ME.I selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi.
9. *Best Supporters*, Afrianzah Kurniawan, Ridho Eka Saputra, Achmad Rifaldi, M.Rizky Dwi Putera, Lyo Akhbar Pratama Putra, Yanuar Rahmat Ikhsan, Mutiara Maulidina, Dyah Ratri Kusumaningtyas, Wira Andhika Arli, Bintang Trias selaku sahabat seperjuangan dan sepermainan dalam menjelajahi perkuliahan dan juga berbagai destinasi di Malang dan sekitarnya.
10. Anita Ramadani Rachma dan Muhammad Fahriansyah selaku sahabat seperjuangan HMJIE serta rival dalam pengerjaan skripsi
11. Desima Sari selaku best supporting system yang menemani penulis dalam keadaan apapun.
12. Teman-Teman HMJIE yang terus memberikan semangat dan dorongan positif kepada penulis
13. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam 2014 yang saling memberikan semangat dari awal skripsi hingga selesai.
14. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang belum dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis adalah skripsi yang telah disusun bisa bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Universitas Brawijaya untuk masa mendatang, khususnya seluruh civitas akademika. Penulis juga berharap skripsi ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 15 Agustus 2018

Muhammad Fikri



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep <i>Syirkah</i> .....	11
2.1.1 Pengertian <i>Syirkah</i> .....	11
2.1.2 Landasan Hukum <i>Syirkah</i> .....	13
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	17
2.1.4 Berakhirnya <i>Syirkah</i> .....	23
2.1.5 Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	24
2.1.6 Ketentuan Umum <i>Syirkah</i> .....	33
2.2 Konsep Transaksi <i>Online</i> .....	35
2.2.1 Konsep Transportasi <i>Online</i> Konvensional.....	35
2.2.2 Konsep Transportasi <i>Online</i> Berdasarkan Pandangan Islam.....	36
2.3 Penelitian Terdahulu .....	39
2.4 Kerangka Pikir .....	42
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	44
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
3.3 Unit Analisis dan Informan Penelitian .....	46
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	50
3.4.1 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.4.2.1. Observasi.....	48
3.4.2.2. Wawancara.....	48
3.4.2.3. Dokumentasi .....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
3.6 Metode Validasi Data .....	52
3.6.1 Triangulasi .....	53
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum PT.Go-Jek Indonesia.....	55
4.2 Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan antara <i>Driver</i> Go-jek dengan PT.Go-Jek Indonesia .....	57
4.2.1 Pemenuhan Hukum Kemitraan ( <i>Syirkah</i> ) antara <i>Driver</i> Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia Berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma' .....	58

4.2.2	Pemenuhan Rukun dan Syarat Kemitraan antara <i>Driver</i> Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia.....	61
4.2.3	Mekanisme Kemitraan antara <i>Driver</i> Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 .....	64
4.3	Ringkasan Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan ( <i>Syirkah</i> ) antara <i>Driver</i> Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia.....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		93
<b>LAMPIRAN</b>		



## Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b>	Penelitian Terdahulu.....	39
<b>Tabel 4.1</b>	Data Informan Penelitian.....	51
<b>Tabel 4.2</b>	Ringkasan Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan ( <i>Syirkah</i> ) antara <i>Driver</i> Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia .....	57



## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1</b>	Aktifitas Bisnis <i>Online</i> di Indonesia.....	2
<b>Gambar 1.2</b>	Peringkat Aplikasi Terbaik.....	7
<b>Gambar 2.4</b>	Kerangka Pikir.....	42
<b>Gambar 4.1</b>	Website Resmi untuk Mendaftar Menjadi Mitra Go-Jek.....	64
<b>Gambar 4.2</b>	Syarat Daftar Go-Jek.....	65
<b>Gambar 4.3</b>	Surat Keterangan Kemitraan Go-Jek.....	71
<b>Gambar 4.4</b>	Kartu Go-Protect Go-Jek.....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada era digitalisasi, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai macam aktivitas masyarakat sudah mulai berputar dengan teknologi-teknologi canggih yang melengkapi kehidupan sosial, budaya, maupun cara seseorang mendapatkan pendapatnya. Ekonomi digital merupakan sebuah ekonomi yang berbasis pada barang dan jasa elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan elektronik. Artinya bisnis dengan proses produksi dan manajemen elektronik dimana interaksi antara mitra dan pelanggan dilakukan melalui teknologi Internet dan Web. Konsep ekonomi digital muncul pada dekade terakhir abad ke-20. Nicholas Negroponte (1995) menggunakan metafora pergeseran dari pengolahan atom ke bit pengolahan.

Semakin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Banyak yang memperdagangkan jualan dengan sistem *online (e-commerce)* sebagai media transaksi (Ustadiyanto, 2001). Teknologi digital memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi inovasi-inovasi bisnis pada berbagai macam bidang. Trend yang muncul secara *significant* pada inovasi bisnis model di Indonesia khususnya masih banyak yang belum memahami dan menerima transformasi digital dari dunia bisnis (Spieth, 2014).

Perkembangan bisnis berbasis *online* di Indonesia masih dapat dikatakan sedikit. Dengan semakin maraknya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan para individu untuk menemukan jalan untuk berwirausaha dan



mendapatkan pendapatan akan tetapi masih belum diiringi dengan pemahaman dan pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada.

**Gambar 1.1 Aktivitas Bisnis *online* di Indonesia**



Sumber: Data diolah GlobalWebIndex, 2018

Berdasarkan data yang didapatkan dari GlobalWebIndex mengenai aktivitas bisnis *online* atau *e-commerce* di Indonesia masih menunjukkan sekitar 45% dari masyarakat Indonesia yang sudah mengunjungi toko *online* dan mencari produk atau jasa dengan tujuan untuk membeli. Dimana sekitar 55% masyarakat Indonesia belum pernah mengunjungi toko *online* atau berbelanja *online* dan membuktikan bahwa masih banyak yang belum bisa menerima transformasi digital dari dunia bisnis.

Menurut Endrico Yogaswara dalam M. Jun dan Cai, S (2014) Kemajuan teknologi khususnya pada sistem informasi telah dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan di dalam industri jasa secara umum dan dalam industri perbankan. Transaksi bisnis yang dilakukan makin banyak menggunakan alat elektronik. Dengan semakin majunya perkembangan zaman maka semakin berkembang pula model dan pola bisnis yang mengharuskan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Dengan semakin terbukanya informasi dan

lapangan pekerjaan pada sektor informal dapat menjadi alternatif untuk memulai bisnis dan menambah pendapatan.

Menurut mardalis dan Hasanah (2016) bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) berdasarkan kaidah Fiqh “*Al-Ashlu fil muamalah alibahah hatta yadullad dalillu ‘ala tahrimiha*” (pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya). Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis, maka Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

Untuk mengarahkan dan menjamin kearah kemaslahatan dalam bermuamalah, telah disebutkan dalam landasan hukum jual beli yaitu Al-Quran, hadits, dan ijma'. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282, serta An-Nisa ayat 29 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>٢٧٥</sup>

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ ضَعِيفًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan

jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Islam mengajarkan kepada pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana hadits Al-Bazzar tentang usaha yang paling baik berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Pekerjaan apakah yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri(hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim)

Dalam *ijma'* para ulama, menurut Hidayat (2015) kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Hal ini dikarenakan tidak ada penentangan terhadap *ijma'* tersebut. Menurut Syafe'l (2004) ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Bisnis *online* merupakan suatu alternatif yang cukup berpotensi dalam mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu bisnis *online* yang cukup terkenal di Indonesia adalah Go-Jek. Go-Jek adalah salah satu bisnis aplikasi *online* yang bergerak dalam bidang transportasi dan memiliki banyak layanan lainnya ([www.go-jek.com](http://www.go-jek.com)). Dilihat dari bentuk model bisnis yang diterapkan oleh PT.Go-jek Indonesia adalah *Business to Consumer* (B2C) yang memfasilitasi konsumen untuk lebih mudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan (Irianto dan Hidayat, 2016). Berdasarkan data yang didapatkan dari perusahaan analisis aplikasi mobile yaitu App Annie yang menunjukkan bahwa Go-Jek masuk 10 besar aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

**Gambar 1.2 Peringkat Aplikasi Terbaik**

No.	App Name	Developer/Company
1	Whatsapp Messenger	Facebook
2	Facebook	Facebook
3	Instagram	Facebook
4	Line	Line
5	BBM	BlackBerry
6	Facebook Messenger	Facebook
7	Shareit	Shareit
8	UC Browser	Alibaba Group
9	Go-jek	Go-jek
10	Grab	Grab

Sumber: Data diolah App Annie, 2018

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Mulai dari proses informasi secara jelas dalam pelayanan tersebut sehingga dapat menciptakan hubungan antara produsen dengan konsumen secara efisien serta dapat mencapai persetujuan.

Akad kemitraan dalam jasa transportasi *online* (Go-Jek) dalam hukum Islam sama halnya dengan akad *musyarakah*. Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *musyarakah* atau bisa disebut *syirkah*. Dalam firman Allah Qs.Shad [38]: 24;

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَا هُمْ ...



*“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”*

Musyarakah sering dilakukan oleh nabi kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadits disebutkan:

*“Musyarakah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan”*

Secara etimologis *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau perserikatan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk dibedakan (Mardani, 2013). Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan (Sudarsono, 1992). Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *syirkah*, *musyawarah* dan *syarikah*, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* merupakan suatu perserikatan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Nasution, 1992).

PT. Go-jek Indonesia adalah salah satu bisnis berbasis *online* yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan banyak manfaat yang dirasakan dari berbagai pihak baik dari mitra itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengatakan sebanyak 94% mitra UMKM merasa Go-Jek memberlakukan mereka secara setara-diuntungkan. Dengan terjalinnya kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia juga memberikan dampak terhadap penekanan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja yang dapat terbukti dengan data yang disampaikan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia sebanyak

78% mitra pengemudi memiliki tanggungan. Dengan meluasnya kesempatan bermitra dengan PT.Go-Jek Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian hukum secara syariah di dalam kemitraan yang dijalankan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul penelitian mengenai **“ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH PADA PROSES KEMITRAAN (SYIRKAH) ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT. GO-JEK INDONESIA”**.

### 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu “Bagaimana Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Proses Kemitraan (*Syirkah*) antara *Driver Go-jek dengan PT. Go-jek Indonesia?*”

### 1.3. Tujuan Penelitian

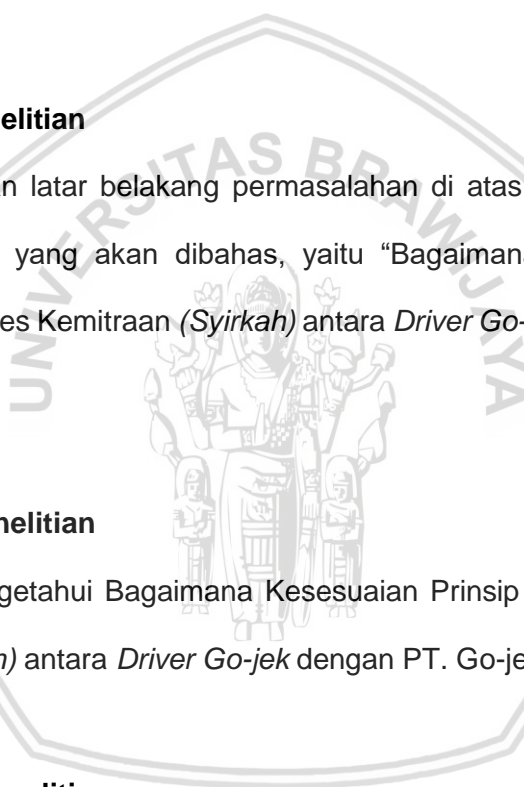
Untuk mengetahui Bagaimana Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Proses Kemitraan (*Syirkah*) antara *Driver Go-jek dengan PT. Go-jek Indonesia*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

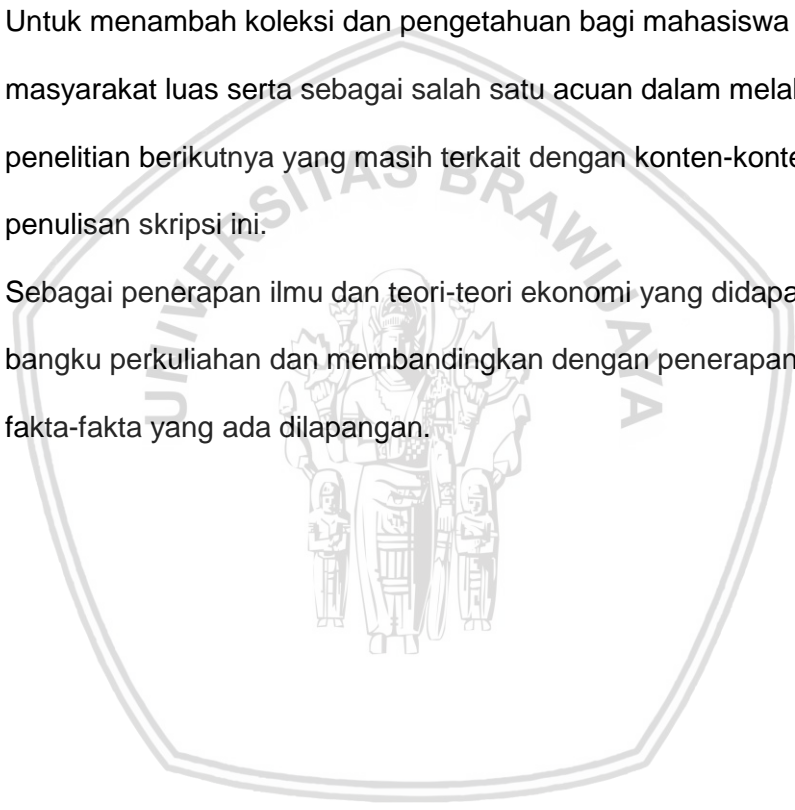
- a. Bagi perusahaan bisnis kemitraan berbasis *online*, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan dalam kontrak kerja sama antara pihak satu dengan lainnya yang berlandaskan sesuai ketentuan prinsip syariah



- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tata cara kemitraan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah Islam.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan kemitraan pada suatu kontrak kerja, khususnya kesesuaian dengan prinsip syariah.
- b. Untuk menambah koleksi dan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas serta sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian berikutnya yang masih terkait dengan konten-konten di dalam penulisan skripsi ini.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori ekonomi yang didapatkan di bangku perkuliahan dan membandingkan dengan penerapan ataupun fakta-fakta yang ada di lapangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep *Syirkah*

Pada sub bab Konsep *Syirkah* akan membahas mengenai pengertian *syirkah* dan landasan hukum *syirkah*

##### 2.1.1 Pengertian *Syirkah*

*Syirkah* adalah salah satu bentuk kerjasama dengan rukun dan syarat-syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut dengan perserikatan/perkongsi dagang (Haroen, 2000).

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang di kutip oleh Bank Indonesia *Syirkah* atau Musyarakah adalah saling berkerja sama, berserikat, berkongsi, bermitra (*cooperation, partnership*); pembiayaan dilakukan berdasarkan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memiliki andil dalam modal dengan ketentuan bahwa *profit* yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Begitu pula dengan kerugian yang ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Dalam Muslich (2015) yang mengutip kamus *Al-Mu'jam Al-Wasih* mengatakan bahwa "*Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama".

Secara etimologis *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau perserikatan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk dibedakan. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan (sudarsono, 1992). Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *syirkah*, musyarakah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan.

Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* merupakan suatu perserikatan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Nasution, 1992).

*Syirkah* merupakan sebuah konsep yang dapat menjadi sebuah resolusi suatu permasalahan didalam permodalan. Secara prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan bersama atau orang lain berhak untuk mendapatkan kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang, tenaga atau barang sewa. Akan tetapi Islam menolak dengan tegas adanya kompensasi berupa bunga (Chapra, 1999).

*Syirkah* atau juga sering disebut dengan syarikah adalah suatu perserikatan dalam islam yang memiliki prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perserikatan dalam sistem ekonomi konvensional. Yang menjadi dasar perbedaan dari *syirkah* dengan perserikatan konvensional tidak hanya terletak dari praktik Bunga saja, tetapi juga memiliki perbedaan dalam hal akad pembentukan transaksi, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000).

Menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3 *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih mengenai permodalan, keterampilan, atau keyakinan dalam berusaha dengan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Menurut Dewan Syariah Nasional *Syirkah* adalah suatu pembiayaan berlandaskan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Secara terminologis terdapat beberapa pendapat dari ahli fiqh mazhab empat, yaitu sebagai berikut:

Menurut ahli fiqih Malikiyah, *syirkah* adalah suatu kebolehan (perizinan) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya tiap-tiap pihak yang saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta/objek *syirkah*. Menurut ahli fiqih Hanafiyah, *syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, *syirkah* adalah suatu hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu hal yang telah disepakati (Mas'adi, 2009).

Syari'at telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan harta miliknya, baik itu dilakukan secara perorangan ataupun membentuk suatu kelompok kerjasama. Maka dari itu, Islam membenarkan bagi mereka yang memiliki modal untuk melakukan usaha dalam bentuk *syirkah*, baik itu berbentuk perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya (AlQardhawai, 1993).

Dari beberapa definisi yang telah dinyatakan dari berbagai pandangan maka dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk dapat bekerja sama dengan menggabungkan harta yang dimiliki untuk dijadikan sebagai modal, dimana keuntungan dan kerugian akan menjadi tanggungan bersama untuk semua pihak yang berserikat.

### **2.1.2. Landasan Hukum Syirkah**

Dalam Ghazaly (2010) *syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaanya diperkuat oleh Al-Quran, hadits, dan *ijma'* ulama. Dalam Majid (1986) sesungguhnya dasarnya hukum *syirkah* adalah *mubah* atau diperbolehkan. Hal ini ditunjukkan oleh tidak dilarangnya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam pada waktu itu. Berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat, hadits, dan *ijma'* ulama yang berkaitan dengan pembiayaan *syirkah*.



a. Al-Qur'an

Terdapat dalam al-Qur'an Firman Allah surat An Nisa ayat 12 sebagai berikut:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...” (QS. An Nisa, 4 :12).

Terdapat pula dalam al-Qur'an pada surat Ash-Shad ayat 24 sebagai berikut:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini...” (QS. Shad, 38: 24).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam telah membenarkan kita para manusia baik muslim maupun non muslim untuk melakukan perkongsian atau berserikat antar sesama dengan menggunakan sepertiga harta kita. Akan tetapi, sangat banyak orang-orang yang melakukan kezaliman kepada yang lain kecuali orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh.

b. Hadits

Adapun hadits yang menjadi landasan untuk melakukan *syirkah* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda:

أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. {رواه أبو داود  
والحاكم عن أبي هريرة}

*“Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu”. (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah).*

Imam al\_bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

*“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqan juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.” (HR al-Bukhari).*

Dari As-Saib Al-Makhzumi pernah meriwayatkan mengenai *syirkah* yang berbunyi sebagai berikut (Al-Kahlani, 1960):

*“Dari As-Saib Al-Makhzumi: bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Dan Ibnu Majah).*

Dalam Hadits Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan sebagai berikut (Al-Kahlani, 1960):

*“dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Saya sekutu dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.” (HR An-Nasa’i).*

*Syirkah* boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang muslim boleh melakukan *syirkah* atau perserikatan dengan siapa saja tanpa memandang agama, asal ataupun lainnya. Selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang sesuai dengan akad dan syariat yang telah ditentukan. Seperti dikatakan sebuah hadits oleh Muslim dari Abdullah bin Umar:

*“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR. Muslim).*

Dari beberapa hadits yang berkaitan tentang *syirkah* jelas bahwa *syirkah* adalah suatu akad yang diperbolehkan oleh syari’at Islam. Bahkan dalam hadits As-Saib Al-Makhzumi dapat diketahui bahwa akad *syirkah* sudah dilaksanakan

sebelum Islam datang. Dimana setelah Islam datang kemudian akad tersebut ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan diperbolehkan dalam Islam.

c. *Ijma'* Ulama

*Ijma'* menurut ahli ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. *Ijma'* adalah suatu kesepakatan mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama (*Mujtahid*) dikalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seluruh *syirkah* yang tercakup dalam *syirkah* uqud (yaitu *syirkah* inan, *syirkah* mufawadah, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujud) mubah/boleh hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi (Hasanudin, 2012). Menurut Imam Syafi'i semua *syirkah* mufawadah, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujud adalah batal (tidak sah) hukumnya.

Dalam konteks *syirkah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni*, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mengatakan: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya." Akan tetapi berdasarkan penjabaran hukum yang dipaparkan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam (Antonio, 2001).

### 2.1.3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perkongsian ataupun perserikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang wajib ketika *syirkah* itu dilaksanakan. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut Abdurahman al-Jaziri yang dikutip dalam buku fiqh muamalah rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *Sighat*, objek akad *syirkah* baik berupa modal maupun jasa.

Pada umumnya rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- a. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya
- b. Orang yang melakukan akad yaitu dua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya minimal dua belah pihak bertransaksi. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, pandai dan tidak dihalangi dalam membelanjakan hartanya
- c. Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. *Syirkah* merupakan suatu kerja sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para penyedia jasa. Pada dasarnya modal dapat bentuk berupa harta ataupun suatu pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui asal usul dan kepemilikannya. (Djuwaini, 2008)

Menurut Sayyid Sabiq rukun didalam *syirkah* yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya suatu *syirkah* dilihat dari ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyarikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku

telah terima. (Sabiq, 1981). Maka dengan ini *syirkah* dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang sudah harus terpenuhi. Berbeda halnya dengan pandangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *Sighat* (ijab dan qabul) dengan argument bahwa *Sighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. (Ath-Thayyar, 2014)

Menurut Ustmani yang dikutip As-carya terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan *syirkah* (Mardani, 2013), diantaranya adalah:

- a. Syarat Akad. *Syirkah* adalah suatu hubungan yang di bentuk oleh para pihak yang melakukan perjanjian/akad yang telah disepakati bersama, terbentuk beberapa syarat akad yaitu;

- 1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*),
- 2) Syarat sah akad (*shihah*),
- 3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*), dan
- 4) Syarat lazim yang harus dipenuhi.

Kedua belah pihak yang bermitra harus memenuhi syarat-syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilakukan dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan dalam melakukannya.

- b. Pembagian proporsi keuntungan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembagin proporsi keuntungan, yaitu:

- 1) Kesepakatan mengenai nisbah bagi yang berlaku untuk kedua belah pihak yang berserikat harus disepakati di awal perjanjian/akad. Jika nisbah bagi hasil belum ditetapkan, maka akad tidak sah menurut syariah.
- 2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan dengan hasil keuntungan yang diperoleh dari



usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

c. Penentuan proporsi keuntungan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan proporsi keuntungan dari pendapat para ahli hukum Islam, yaitu:

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan diantara pihak-pihak yang bersekutu pada awal akad melakukan *syirkah* dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang disertakan pihak-pihak yang bersekutu
- 3) Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Akan tetapi, pihak yang memutuskan menjadi *sleeping partner*. Proporsi keuntungan tidak boleh melebihi modalnya

d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap pihak yang bersekutu bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan porsi investasinya.

e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang di investasikan oleh masing-masing pihak haruslah dalam bentuk modal likuid.

f. Manajemen *Syirkah*. Prinsip dari *syirkah* adalah setiap pihak yang mempunyai hak untuk berkontribusi dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan bersama tersebut.



Dalam *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* dijelaskan bahwa *syirkah* itu memiliki lima syarat, yaitu:

- a. Terdapat barang berharga yang berupa dirham dan dinar
- b. Pihak yang berserikat harus menginvestasikan modalnya dengan sama jenis dan macamnya
- c. Harta yang diinvestasikan oleh kedua belah pihak akan digabungkan menjadi modal bersama
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut
- e. Resiko untung dan rugi menjadi tanggungan bersama

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan *syirkah* (Bakrin, 1992), yaitu:

- a. Harta atau Modal yang disyirkahkan diukur dengan uang
- b. Modal atau harta yang diinvestasikan sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Harta yang diinvestasikan menjadi modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan lainnya
- d. Masing-masing pihak mengizinkan untuk menggunakan harta tersebut
- e. Untung dan rugi yang diterima sesuai dengan jumlah harta atau modal masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal.

Abdul Aziz Dahlan berpendapat bahwa dalam *syirkah* terdapat syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Syirkah* adalah sebuah transaksi yang dapat diwakilkan

- b. Kejelasan proporsi pembagian keuntungan diantara masing-masing pihak yang berserikat
- c. Nisbah bagi hasil diambil dari keuntungan *syirkah*, bukan dari harta lain.

Dari berbagai banyak perspektif yang membahas tentang *syirkah*. Hal terpenting yang selalu menjadi syarat dalam melaksanakan *syirkah* adalah akad. Karena pada akad itulah suatu kesepakatan dibentuk. Pada dasarnya, secara garis besar syarat tiap-tiap akad transaksi memiliki batasan tertentu untuk menentukan hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu di luar syarat. Akan tetapi, tidak sedikit pula batasan yang ada tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan. Para ulama membagi syarat akad menjadi dua, yaitu:

a. Syarat Syar'i

Syarat syar'i adalah syarat yang berdasarkan sebab. Misalnya rajam adalah suatu hukuman bagi pelaku zina maka nikah adalah syarat wajib. Adakalanya syarat itu untuk sah secara hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah. (Zakiyu, 1965)

b. Syarat Ja'li

Syarat Ja'li adalah suatu syarat yang asal mulanya dari perbuatan dan kehendak manusia yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan pada suatu akad(transaksi) yang berkaitan dengan syarat tersebut. Jika syarat tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah. (Abdurrauf, 1983)

Pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya pula keluar ijab dan qabul. Dalam menjadi pelaku akad terdapat beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan oleh orang tersebut sudah

memenuhi persyaratan dan dikatakan sah. Syarat-syarat orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya: telah baligh dan berakal sehat. (Zaidan, 2008)

Adapun Syarat-syarat dalam melakukan akad *syirkah* sebagai berikut (Zuhaili, 1989):

- a. Ucapan, tidak ada patokan atau indikator khusus dari kontrak *syirkah*. Ucapan dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal maupun secara tulis. Kontrak *syirkah* dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus memiliki kompetensi dalam memberikan dan diberikan kuasa perwakilan
- c. Objek Kontrak, yaitu harta dan usaha. Dimana harta yang digabungkan menjadi modal bersama haruslah sama dalam hal kualitas maupun kuantitas. Beberapa ulama memberikan kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Jika penggabungan modal dengan menggunakan harta tak berwujud maka, haruslah tetap diukur dahulu secara tunai dan disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Salah satu pihak juga dapat menandai pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian lebih bagi dirinya.

#### **2.1.4. Berakhirnya *Syirkah***

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, para ulama fiqh mengemukakan pandangan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad *syirkah* secara umum, yaitu:

- a. Salah satu pihak yang berserikat mengundurkan diri, karena para ahli fiqh berpendapat bahwa *syirkah* itu tidak bersifat wajib dalam arti boleh dibatalkan
- b. Salah satu pihak berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kedudukan dalam hukum, atau menjadi gila, lupa ingatan, dan sebagainya
- d. Salah satu pihak yang berserikat murtad ( keluar dari agama islam) dan melarikan diri ke negeri yang sedang berperang melawa negeri muslim karena manusia seperti ini sudah dianggap meninggal dunia.

Menurut ulama fiqh juga berpendapat bahwa hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, apabila dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Dahlan, 1996):

- a. Dalam *syirkah* al-mufawadah, modal tiap-tiap pihak yang berserikat tidak sama kualitasnya, karena al-mufawadah sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, usaha maupun bagi hasil keuntungan yang didapatkan.
- b. Dalam *syirkah* al-amwal, akad *syirkah* dinyatakan batal jika seluruh atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena objek yang disyirkahkan pada *syirkah* al-amwal adalah harta. Dengan hilangnya modal, maka berakhir pula *syirkah* tersebut.

#### 2.1.5. Macam-macam *Syirkah*

Pada umumnya *syirkah* dibagi menjadai dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud/akad* (kontrak).

- a. *Syirkah amlak*

*Syirkah amlak* adalah suatu bentuk kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang dan diperoleh tanpa adanya suatu akad. Melainkan

melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berujung pada kepemilikan. Dalam *syirkah* ini suatu kepemilikan antara dua belah pihak yang saling berbagi dalam asset atau modal yang dimiliki dan juga berbagi dalam hal untung atau *profit* yang dihasilkan oleh asset tersebut. *Syirkah amlak* ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu *syirkah ikhtiari* dan *syirkah Jabari*:

1) *Syirkah Ikhtiari* (sukarela)

أَنْ يَجْتَمِعَ فِي مِلْكٍ عَيْنٍ بِاخْتِيَارِهِمَا

*“berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya”*

*Syirkah Ikhtiari* adalah bentuk kepemilikan bersama yang disebabkan oleh tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua atau lebih orang sepakat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka bersama. (Suhendi, 2002)

2) *Syirkah Jabari* (paksa)

أَنْ يَجْتَمِعَا شَخْصَانِ فِي مِلْكٍ عَيْنٍ قَهْرًا

*“berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.”*

*Syirkah Jabari* adalah bentuk kepemilikan bersama yang disebabkan secara paksa dan bukan dari kesadaran ataupun keinginan pihak yang berserikat. Sebagai contoh, harta warisan yang

diwariskan kepada anak-anaknya dan harta tersebut menjadi milik bersama bagi anak-anak tersebut. (Mas'adi, 2002)

Para ahli fiqh mengatakan bahwa kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak tiap-tiap pihak yang berserikat dan bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Dimana seorang mitra tidak berhak menguasai atau menggunakan harta milik mitra yang lain tanpa seizin dari yang bersangkutan. Karena semua pihak memiliki hak yang sama.

b. *Syirkah uqud*

*Syirkah uqud* terjadi disebabkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberikan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah uqud* terdiri dari beberapa bagian (Mardani, 2013), yaitu:

1) *Syirkah inan*

Menurut sayid sabiq, pengertian dari *syirkah inan* adalah sebagai berikut:

*“Syirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka”*

*Syirkah inan* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan prinsip *Profit Loss Sharing* yang sesuai dengan modal masing-masing. Namun, apabila terdapat perbedaan porsi modal didalam *syirkah* tersebut maka pembagian porsi keuntungan dan kerugian diatur sesuai kesepakatan.

Para ahli fiqh membuat sebuah kaidah mengenai pembagian hasil dari *syirkah* sebagai berikut:



الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

*“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing”.* (mardani, 2013)

Terdapat beberapa ketentuan *syirkah inan* yang berkenaan pada sektor bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi), dan kerusakan harta *syirkah*. Berikut ketentuan *syirkah inan* (Hasanudin, 2012), yaitu:

a) Syarat pekerjaan

Dalam *syirkah inan* dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menentukan kesepakatan kerja. Maka akan terdapat pembagian kerja antara pihak A dan pihak B yang saling membantu sama lain. Misalnya, pihak A membeli bahan baku dan pihak B mengolah dan menjual hasil usahanya

b) Pembagian keuntungan

Pandangan para ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Akan tetapi menurut Hanafiyah selain Jafar, diperbolehkan pula keuntungan dan modal tidak sama antara pihak satu dan lainnya. Dikarenakan didalam *syirkah*, selain dengan harta atau modal dapat juga berkontribusi dengan memberikan jasa atau pekerjaan.

Ulama Hanbilah dan Zaidiyah berpandangan sama dengan Hanafiyah, akan tetapi perbedaanya terletak pada perhitungan kerugian yang harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. (Syafe'i, 2004)



c) Harta *syirkah* rusak

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah apabila terjadi kerusakan pada harta *syirkah* sebelum digunakan, atau pada salah satu harta sebelum dicampurkan, maka akad *syirkah* batal. hal ini dikarenakan yang disyirkahkan adalah harta.

Namun, apabila terjadi kerusakan pada harta setelah dipergunakan atau dibelanjakan maka akad *syirkah* tetap berjalan, dan apa pun yang telah digunakan atau dibelanjakan menjadi tanggungjawab pihak yang berkongsi.

d) Tasarruf (pendayagunaan) harta *syirkah*

Masing-masing anggota perserikatan mempunyai hak untuk memperjualbelikan harta *syirkah*, karena dalam *syirkah Inan* yang berserikat memiliki dan memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan harta mereka, juga diperbolehkan untuk membelanjakannya secara tunai ataupun ditangguhkan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah harta *syirkah* yang diperjualbelikan tidak boleh secara tunai. Berbeda dengan pandangan Hanabila yang memperbolehkan keduanya. Akan tetapi pendapat yang banyak dipergunakan adalah harta yang diperjualbelikan secara tidak tunai. (Syafe'I, 2004)

2) *Syirkah Mufawadhah*

*Mufawadhah* dalam arti bahasa adalah *al-musawah*, yang berarti "persamaan". Didalam *syirkah mufawadhah* terdapat unsur-unsur persamaan modal, keuntungan, kesamaan hukum, dan lain-lainnya. (Zuhaili, 1986)

Dalam *syirkah Mufawadhah* terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHEs yang menjelaskan bahwa pihak dan/atau para pihak yang melakukan akad *syirkah Mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya. Dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad *syirkah Mufawadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan transaksi jual-beli dan/atau penyewaan. Hadu *syirkah Mufawadhah* ini tidak hanya untuk jual-beli saja melainkan dapat berupa pengakuan utang ataupun penyewaan.

Dalam arti istilah, *syirkah Mufawadhah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Muamalat yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

*“Syirkah mufawadhah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal uang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.”*

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *syirkah Mufawadhah* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan, dimana setiap pihak memiliki tanggung jawab atas pihak lainnya.

Dalam melaksanakan *syirkah Mufawadhah* terdapat beberapa syarat-syarat dalam *syirkah Mufawadhah* yang harus dipenuhi (Mardani, 2013), yaitu:

- a) Sama dalam modal. Dalam *syirkah Mufawadhah* modal yang digabungkan antara pihak satu dengan lainnya haruslah sama. Jika modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lainnya maka *syirkah* tersebut batal.
- b) Memiliki kewenangan yang sama dalam kedudukan hukum. Dengan begitu, jika diantara pihak yang melakukan *syirkah* belum dapat dikatakan dewasa/baligh, maka ia tidak sah dikatakan sebagai anggota perserikatan.
- c) Memiliki kesamaan dalam agama. Maka, jika salah satu pihak Bergama diluar agama Islam perkongsian tersebut dianggap tidak sah.
- d) Tiap-tiap pihak yang berserikat mempunyai hak yang sama dalam bertindak atas nama *syirkah*.

Adapun ketetapan-ketepatan khusus yang terdapat didalam *syirkah Mufawadhah* diantaranya (Syafe'i, 2004), yaitu:

- a) Pengakuan hutang, dibolehkan atas dirinya dan pihak lainnya
- b) Penetapan kesamaan hutang
- c) Harus ada agunan/jaminan
- d) Tiap-tiap pihak memiliki hak untuk menuntut segala aturan yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan
- e) Segala hal yang tidak berkaitan dengan *syirkah* maka tidak boleh diambil dari *syirkah*, seperti membayar denda, pungutan, dan lain-lain.

Dalam pandangan Hanafiyah dan Malikiyah, *syirkah Mufawadhah* ini hukumnya diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan karena banyak masyarakat terdahulu yang menggunakan *syirkah Mufawadhah* dan tidak ada seorang pun yang menolaknya.

Berbeda dengan menurut Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan melakukan *syirkah Muwafadhah*, beliau mengatakan bahwa:

*"Apabila syirkah mufawadhah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini".*

Pada pandangan Safi'i *syirkah Muwafadhah* dianggap suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Terlebih lagi, bentuk akad *syirkah Mufawadhah* tidak memiliki ketentuan yang kuat dalam syariat dan hadits yang digunakan oleh Hanafiah merupakan hadits yang tidak shahih dan tidak dapat diterima.

### 3) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam membeli dan keduanya bertanggung jawab atas hal tersebut. *Syirkah* ini tidak menggunakan modal melainkan modal kepercayaan satu sama lain dan membagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. (Al-Fauzan, 2005)

Sayid Sabiq mendefinisikan *Syirkah Wujuh* sebagai berikut:

*"Syirkah wujuh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan"*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah Wujuh* merupakan kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka mengandalkan kepercayaan pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bekerja sama adalah dengan cara berhutang dengan para pedagang dan memperjual-belikannya kembali dan hasil penjualan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan.

Menurut pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah* yang seperti ini dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan menurut kedua pandangan tersebut yang disebut *syirkah* adalah sesuatu yang berdasarkan modal dan kerja/usaha, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada dalam *syirkah Wujuh*. (Sabiq, 2004)

#### 4) *Syirkah Abdan*

Sayid Sabiq mendefinisikan *syirkah Abdan* sebagai berikut:

*"Syirkah abdan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan".*

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *syirkah Abdan* atau juga bisa disebut *syirkah a'mal* adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Dimana, keuntungan ataupun kerugian dari usaha tersebut akan dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian. *Syirkah abdan* dinyatakan sah walau berbeda profesi. Alasan diperbolehkannya *syirkah abdan* dikarenakan adanya

hadis yang diriwayatkan Abu Ubaidah Dari Abdullah, ia berkata sebagai berikut:

*“Aku, Ammar dan Said pernah bersyirkah dalam perolehan bagian perang Badar. Lalu Said datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majh).*

Pembagian laba pada *syirkah* ini berdasarkan tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah satu pihak tidak mendapatkan pekerjaan, keuntungan laba tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berserikat dapat berbeda satu sama lain begitu pula dengan keuntungan dan kerugiannya. (Sabiq, 2004)

#### **2.1.6. Ketentuan Umum *Syirkah***

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pembiayaan *Musharakah (Syirkah)*, terdapat beberapa ketentuan umum mengenai hal tersebut, yaitu:

- 1) Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.
- 2) *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi 'iyah/natur like person*) maupun yang



dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah l'tibariah / syakhshiyah hukmiyah/ rechtperson*).

- 3) *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
- 4) *Syirkah amwal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
- 5) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja. Termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
- 6) *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
- 7) *Taqwin al-'urudh* adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
- 8) Nisbah bagi hasil dapat juga disingkat nisbah adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
- 9) Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam *syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
- 10) Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
- 11) *Syirkah da'imah* atau *Syirkah tsabitah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad



syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad *syirkah*, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'qqatah*) maupun tidak dibatasi.

- 12) *Musarakah mutanaqishah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.
- 13) Kerugian usaha (*al-khasarah*) *musarakah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- 14) *At'ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
- 15) *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan
- 16) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

## 2.2. Konsep Transportasi *Online*

Pada sub bab Konsep Transportasi *Online* akan membahas mengenai pengertian Transportasi *Online* secara konvensional dan menurut pandangan Islam.

### 2.2.1 Konsep Transportasi *Online* Konvensional

Transportasi online adalah sesuatu yang baru dari inovasi didalam *m-commerce*. Layanan transportasi online atau berbagi tumpangan adalah layanan perorangan dimana konsumer dapat memesan tumpangan (mobil, motor, dll) melalui aplikasi *mobile* yang akan ditanggapi langsung oleh pengemudi melalui aplikasi tersebut (Wallsten, 2015). Aplikasi mengandung beberapa benefit seperti

para pengemudi dan konstumer dapat mengetahui secara persis lokasi kedua belah pihak, konstumer dapat melihat informasi supir, kendaraan yang dibawa, dan konstumer sangat mudah untuk menemukan transportasi untuk berpergian ke tempat lain (Farin, 2016).

Watanabe dkk (2016) menjelaskan bahwa berbagi tumpangan adalah layanan yang berdasarkan permintaan dan menghubungkan penumpang, dan pemilik kendaraan dengan menggunakan *real-time* teknologi *mobile*. Transportasi online merupakan layanan yang sudah biasa bagi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Transportasi online merupakan bagian dari layanan *m-commerce* yang didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan jaringan jaringan *mobile*. Dalam *m-commerce*, para konstumer dapat memesan produk atau layanan jasa yang mereka inginkan melalui internet tanpa menggunakan komputer (Clarke III, 2001). Semakin berkembangnya technology telepon genggam semakin banyak pula orang-orang yang menggunakan *m-commerce* dan semakin banyak pula orang-orang menggunakannya sebagai peluang bisnis.

### 2.2.2 Konsep Transportasi *Online* Berdasarkan Pandangan Islam

Dalam Sholikha (2016) mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW kendaraan yang digunakan untuk berpergian jauh bahkan digunakan dalam perang adalah unta. Memiliki tenaga yang untuk berjalan ditengah gurun pasir menjadi nilai tambah dari hewan tersebut. Walaupun jika berbicara tentang kecepatan yang dapat ditempuh kuda lebih unggul dibandingkan unta. Dalam hal ini, binatang-binatang tunggang serta alat-alat untuk mengangkut barang-barang merupakan kendaraan yang memang diciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai. QS. Yasin: 41-42 yang berbunyi:

وَعَايَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝١١ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝

*“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”*

Seiring bertambahnya populasi manusia yang terus meningkat. Sumber daya dan juga sarana yang dimiliki pun semakin tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pada awal abad ke-20 telah diciptakan sebuah alat yang membantu manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas berkehidupan khususnya dibidang transportasi seperti kereta api, mobil, motor, dan juga pesawat terbang.

Disebutkan pada Firman Allah dalam QS. An-Nahl: (8) yang berbunyi:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

*“dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”*

Telah banyak kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia didunia. Akan tetapi masih banyak pula manusia-manusia yang tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada mereka. Banyak pula yang menuntut haknya tanpa melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah. Pada firman Allah disebutkan dalam surat Al-isra' ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*

Dengan semakin majunya zaman maka semakin banyak pula inovasi-inovasi yang dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya internet pada zaman ini maka semakin berkembang pula pola pemenuhan kebutuhan manusia. Transportasi *online* merupakan salah satu bentuk inovasi yang sedang berkembang di zaman sekarang ini. Dalam hukum Islam transportasi *Online* diperbolehkan. karena belum ada suatu dalil yang mengatakan hal tersebut haram, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi (Muslich, 2015):

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Berdasarkan dalil yang dikatakan diatas yang dapat diambil kesimpulannya adalah, dalam bermuamalah Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat didunia untuk mengelolanya demi kemaslahatan tiap-tiap individu tersebut. Maka dari itu semua bentuk akad dan bebergai macam transaksi diperbolehkan, asalkan tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syari'at. Dijelaskan pula dalam Qs. Al-Baqarah: 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*

Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara apapun selama tidak melanggar ajaran dan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Maka dapat dikatakan bahwa transportasi *online* adalah suatu bentuk usaha dari manusia didunia untuk dapat mencari rizki melalui akad *syirkah*.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil
1.	Mahmudatus Sa'diyah & Nur Aziroh (2014)	<i>Musyarakah</i> dalam Fiqih dan Perbankan Syariah	Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bagaimana praktek perbankan syariah dalam melakukan akad <i>musyarakah</i> dimana praktek yang dilakukan oleh bank syariah masih sama dengan perbankan konvensional. Ditunjukkan dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan diawal beserta dengan nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank ditentukan diawal. Resiko usaha dari <i>musyarakah</i> tidak menjadi tanggung jawab bersama

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil
			melainkan hanya dari pihak nasabah saja. Adanya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah juga tidak sesuai dengan perspektif fiqh.
2.	Nur Azizah (2015)	Studi Komparatif Tentang <i>Outsourcing</i> Pemborongan kerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan <i>Syirkah</i> dalam Islam	Hak dan kewajiban para tenaga kerja dalam UU ketenagakerjaan dan Hukum Islam adalah mengenai kebebasan memilih profesi dimana para buruh dapat memiliki pekerjaan apa yang mereka kehendaki dan layak dengan perlakuan yang setimpal baik itu berupa waktu istirahat, gaji, dll. Jelasnya hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan para pekerja akan lebih memudahkan pekerjaan dan tidak adanya diskriminasi sebelah pihak.
3.	Edi susilo & A. Khoirul Anam (2018)	<i>Sharia Compliance</i> Akad Berbasis <i>Natural Uncertainty</i>	Hasil dari penelitian mengatakan bahwa terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan akad <i>syirkah</i>

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil
		<i>Contract (NUC)</i> Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Jepara	yang berbasis <i>Natural Uncertainty Contract (NUC)</i> sesuai fatwa DSN-MUI, yaitu: Pertama, resiko tinggi yang akan ditanggung oleh BMT; kedua, SDM pengurus BMT yang masih belum berkompeten; ketiga, tidak adanya laporan keuangan anggota/nasabah sehingga akad <i>syirkah</i> sulit dijalankan dengan tepat.

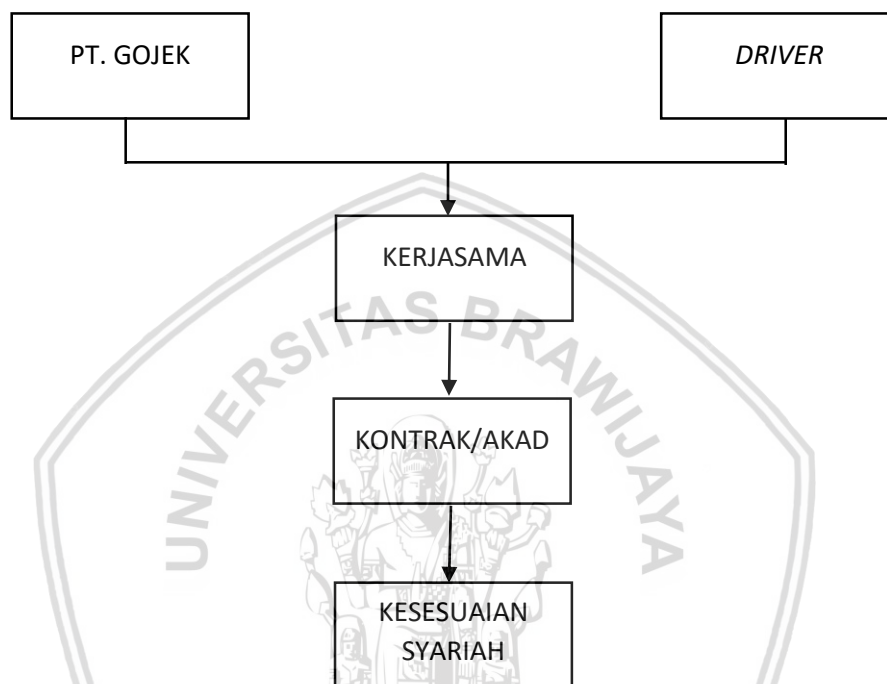
Sumber: Berbagai sumber diolah, 2018



## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu pola pikir atau langkah-langkah berpikir secara teoritis yang dibuat oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang umumnya berbentuk kalimat pertanyaan (Zulganev, 2013).

Gambar 2.2: **Kerangka pikir**



Sumber: Penulis, 2017

Berdasarkan dari teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya mengenai praktik-praktik *syirkah* sesuai syariat Islam.

Dalam menjalankan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa khususnya transportasi PT.GOJEK yang telah memaksimalkan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi *mobile* dan internet yang sudah cukup tersebar di Indonesia. PT.GOJEK membutuhkan para tenaga kerja yang hendak bekerja sama dan menambah penghasilan dirinya sendiri. Disisi lain, para *driver* yang selama ini mendapatkan penumpang melalui cara tradisional juga membutuhkan informasi para penumpang yang lebih efektif.

Dari hal tersebut, PT.GOJEK dan driver dapat dikatakan membutuhkan satu sama lain. Bertemunya para *driver* dengan PT.GOJEK akan terciptalah sebuah kerjasama. Dalam kerjasama antara kedua belah pihak akan terdapat kontrak yang harus disepakati. Dimana, kontrak atau akad yang dilakukan oleh PT.GOJEK dengan para *driver* akan ditinjau melalui hukum islam. Kerjasama antara pihak GOJEK dengan para *driver* dalam islam disebut *syirkah*/musyarakah. *Syirkah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai kemaslahatan masing-masing pihak.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode merupakan hal penting dalam melakukan suatu penelitian guna untuk membantu peneliti dalam mencapai tujuannya dengan memperhatikan metode dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Suatu penelitian akan efektif dalam mencapai tujuannya dengan yang diharapkan apabila memperhatikan metode yang digunakan (Nazir, 1993).

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memaknai maksud dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Rahmat (2009) penelitian kualitatif adalah salah satu sistematisa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku individu-individu yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu mendapatkan hasil uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif ini merupakan salah satu metode untuk mendapatkan sebuah fakta dan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian. Dalam penelitian ini akan menyajikan data yang didapat dari lapangan yang diinterpretasikan terhadap kebijakan dan teori yang terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kesesuaian syariah pada proses kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, menurut Krippendorff dalam Mahmudahningtyas (2015) *content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan benar dengan memperhatikan konteksnya. *Content analysis* mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Tujuan dalam *content analysis* adalah untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya. Menurut Holsti dalam mahmudahningtyas (2015) *content analysis* merupakan suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Metode *content analysis* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian syariah dalam kemitraan PT. Go-Jek Indonesia.

Berdasarkan rangkaian teori mengenai pendekatan penelitian kualitatif dengan metode *content analysis*, penelitian ini fokus pada deksripsi data berupa kalimat-kalimat yang mendalam, yang didapatkan dari informan yang memiliki relevansi terhadap operasional kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia. berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat kualitatif.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan, penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang Jawa TImur. Tempat ini dipilih karena PT. Go-Jek Indonesia memiliki sistem yang terintegrasi di seluruh Indonesia maka dengan memilih lokasi terdekat akan mempercepat peneliti untuk mendapatkan informasi penelitian. Waktu yang digunakan untuk mendapatkan informasi diperkirakan selama 1-2 bulan.

### 3.3. Unit Analisis dan Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian, penentuan siapa dan apa yang akan dijadikan objek penelitian adalah tahap yang harus dilakukan. Untuk menentukan objek penelitian, maka unit analisisnya harus ditentukan terlebih dahulu. Unit analisis adalah satuan analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian. Satuan analisis dapat berupa berbagai hal baik dari individu, keluarga, rumah tangga, kelompok atau organisasi, dan barang atau sesuatu. Dari tiap unit analisis yang digunakan haruslah memiliki karakteristik tertentu.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kesesuaian syariah dalam proses kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia. PT. Go-Jek Indonesia yang tersebar di Indonesia tepatnya berada di Malang dipilih menjadi unit analisis karena terintegrasinya sistem PT. Go-Jek Indonesia dalam hal kontrak kemitraan membuat antar kantor cabang PT. Go-Jek Indonesia memiliki panduan yang sama. Maka, kantor cabang terdekatlah yang menjadi unit analisis dari peneliti.

Dalam mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan penelitian, maka dibutuhkan informan yang berasal dari unit analisis. Informan memiliki pengertian yang sama dengan sampel, yakni sumber informasi. Namun, sumber informasi pada penelitian kualitatif adalah manusia, sedangkan sampel pada kuantitatif bisa manusia dan benda.

Informan terbagi menjadi dua, yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah sumber informasi yang utama berkaitan dengan pokok permasalahan dengan hal yang diteliti. Sedangkan informan pendukung adalah sumber informasi yang mendukung informasi dan informan kunci. Pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap aturan kemitraan yang dibuat

- 2) Seseorang yang kapabilitasnya mengetahui dan memahami segala hal mengenai sistem kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia
- 3) Seseorang yang sudah atau baru bergabung menjadi *driver* pada PT. Go-Jek Indonesia
- 4) Seseorang akademisi yang memiliki kemampuan dalam bidang kesesuaian syariah

Berdasarkan kriteria informan, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala kantor cabang dan *driver* Gojek,

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan beberapa jenis data dan cara pengumpulannya.

#### **3.4.1. Jenis dan Sumber data**

Dalam penelitian ini menggunakan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang akan didapatkan dari akademisi dan juga praktisi.

Data lain yang digunakan untuk menunjang data primer adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017, dan studi literature (yang berasalkan dari buku, jurnal, *thesis*, dan penelitian terdahulu).

### **3.4.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti, maka terdapat teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut:

#### **3.4.2.1 Observasi**

Observasi merupakan sebuah dasar dalam suatu ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan membutuhkan data sebagai landasan atas hipotesis dan teori yang dibuat, dimana hal tersebut membutuhkan data sebagai fakta yang memperkuat hasil penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat belajar dan mengetahui mengenai perilaku, pola pikir, dan makna dari perilaku dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini akan menggunakan observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah suatu penelitian dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan tertulis.

#### **3.4.2.2 Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang spesifik dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden/informan sedikit/kecil (Sugiyono, 2017).

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang menggunakan teknik wawancara terdapat dua macam teknik yang dapat dilakukan, yaitu wawancara terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan



sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Maka dari itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan (Sugiyono, 2017).

Kedua, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini akan menggunakan kedua macam teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kedua pemakaian teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan tetap sesuai dengan konteks penelitian.

#### **3.4.2.3 Dokumentasi**

Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah terjadi dan dapat digunakan untuk keabsahan data. Dokumen dapat berbentuk tulisan Misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen dapat pula berbentuk gambar Misalnya foto, gambar hidup, sketsa, patung, dan film. Hasil dari penelitian observasi dan wawancara akan menjadil lebih kredibel jika didukung dengan data dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Adanya dokumen yang sesuai dengan konteks penelitian akan membantu peneliti dalam menguji keabsahan data, membuat intepretasi, dan dapat menjadi landasan dalam penarikan kesimpulan. Dokumen yang diperoleh peneliti digunakan untuk mempermudah penelitian apabila peneliti terdapat kekeliruan yang ditemukan disaat penelitian. Karena sumber data memiliki data bersifat tetap.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017) analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk mengetahui dan memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spradley dalam Sugiyono (2017) mengatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah model interaktif dalam analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyaknya jumlah data yang didapatkan dari lapangan membutuhkan pencatatan yang teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka semakin banyak data yang kompleks dan rumit. Maka dari itu data dengan jumlah yang banyak perlu direduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menemukan pola dari data tersebut. Dengan mereduksi data maka akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan mencari data jika diperlukan (Sugiyono, 2017).

Peneliti dalam mereduksi data akan memfokuskan pada kesesuaian syariah yaitu berdasarkan hukum syariah serta rukun dan syarat dengan melihat proses kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Indonesia dengan para *Driver* dan dihubungkan dengan fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) bentuk yang paling sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami (Sugiyono, 2017).

## 3) *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan dalam

penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

### 3.6. Metode Validasi Data

Menurut Sugiyono (2017) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah memiliki kesamaan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian.

Validasi data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui uji kredibilitas yaitu menguji validitas data dari internal atau dari peneliti sendiri yang melakukan uji validitas tersebut. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan metode triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan *member check*. Ketiga metode ini dipilih karena memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi serta tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di lapangan.

#### 3.6.1 Triangulasi

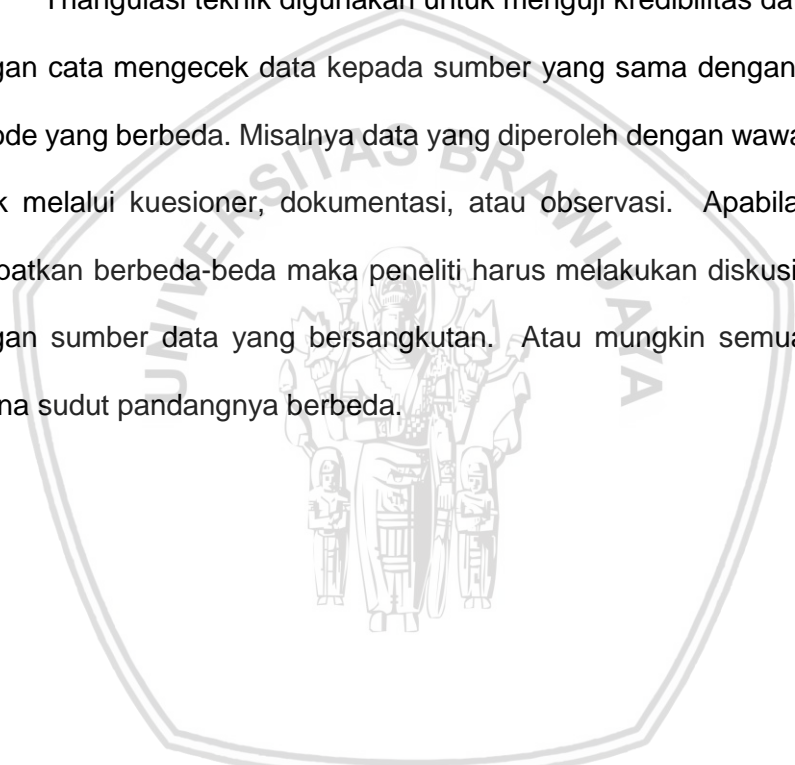
Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2017) triangulasi adalah validasi silang penelitian kualitatif. Ini menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan dua teknik triangulasi yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (*member check*) besrsama mengenai hasil triangulasi sumber tersebut

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cata mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara akan dicek melalui kuesioner, dokumentasi, atau observasi. Apabila data yang didapatkan berbeda-beda maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan (*syirkah*) antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia. Sebelum membahas hasil penelitian, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* dimana penelitian dilakukan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya (Mahmudahningtyas, 2015) sehingga peneliti dapat menganalisis kesesuaian syariah dalam kemitraan PT. Go-Jek Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka perlu diketahui bahwa informan kunci dari penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Fathur Rahman, Akademisi (Ulama)
- 2) Bapak Anas Budiarto, Akademisi (Ulama)

Selain itu terdapat beberapa informan pendukung yang terkait dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.1 : **Data Informan Penelitian**

No	Nama	Peran	Usia	Keterangan
1	M. Rizky Dwi Putra	<i>Driver</i> Go-Jek	22	Informan pendukung
2	Moh. Fathoni	<i>Driver</i> Go-Jek	23	Informan pendukung

Sumber: Data Lapangan Peneliti, 2018

#### 4.1. Gambaran Umum PT. Go-Jek Indonesia

Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang memiliki jiwa sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Go-Jek memiliki 3 nilai sebagai landasan dalam segala yang dilakukan yaitu: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta masih akan ada pengembangan di kota-kota lainnya. (Go-jek, 2018)

PT.Go-Jek Indonesia memberikan berbagai macam fasilitas untuk para penumpang yang memesan melalui *smartphone* tiap-tiap individu dengan menuliskan tempat tujuan yang akan diikuti dengan biaya yang harus diberikan kepada *driver*. Dengan itu pula, masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Semakin berkembangnya zaman Go-Jek kini tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap. Dengan slogan *an ojek for every need*.

Go-Jek semakin berkembang dari hari ke hari yang kini semakin banyak pula fitur yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi Go-Jek. Dengan bantuan teknologi berbasis aplikasi dari *smartphone*, berikut beberapa layanan dari Go-Jek, yaitu:

1. Go-Car, merupakan layanan jasa mengantar penumpang dengan menggunakan transportasi roda empat;



2. Go-Ride, merupakan layanan jasa mengantar penumpang dengan menggunakan transportasi roda dua;
3. Go-Food, merupakan layanan jasa pesan antar makanan dan minuman dari 75.000 restoran yang tergabung dalam Go-Jek;
4. Go-Box, merupakan layanan jasa mengantar barang dengan menggunakan mobil pick up, engkel, boks, dan engkel boks untuk kebutuhan seperti pindahan;
5. Go-Mart, merupakan layanan jasa belanja instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari ratusan toko dan 18 kategori berbeda;
6. Go-Send, merupakan layanan jasa kurir instan untuk mengirim barang dan dokumen dengan cepat;
7. Go-Massage, merupakan layanan jasa pijat relaksasi professional;
8. Go-Tix, merupakan layanan jasa pesan tiket nonton bioskop dan berbagai event;
9. Go-med, merupakan hasil kolaborasi Go-jek dengan Halodoc (apotik antar), Go-Med memfasilitasi dalam menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotik di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya;
10. Go-Clean, merupakan layanan jasa kebersihan professional yang tersedia jabodetabek, medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, dan Manado;
11. Go-Glam, merupakan Layanan jasa ahli kecantikan professional untuk kebutuhan kaum hawa;
12. Go-Auto, merupakan layanan jasa perawatan cuci, servis, layanan darurat untuk kendaraan pribadi;
13. Go-Pay, merupakan suatu layanan untuk membantu dalam melakukan pembayaran di seluruh Go-Jek (sistem *top up* saldo) dimana cara ini

akan membuat penggunaan mendapatkan potongan biaya. Kemudian fitur terbaru Go-Pay dapat melayani kebutuhan transaksi harian;

14. Go-Points, merupakan suatu program loyalty kepada pengguna Go-pay dimana pengguna akan mendapatkan poin setiap bertransaksi menggunakan Go-Pay dan jika terkumpul akan mendapatkan berbagai macam *reward* menarik;

15. Go-Pulsa, merupakan suatu layanan isi pulsa dan internet dari berbagai pilihan operator di Indonesia melalui pembayaran saldo Go-Pay.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada proses akad kemitraan (*syirkah*) antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia yang dimana masih banyak para masyarakat yang belum tau mengenai syarat-syarat apa saja untuk melakukan suatu akad kemitraan yang benar menurut pandangan Islam.

#### **4.2. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan antara Driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia**

Pada analisis kesesuaian syairah pada proses kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia, akan membahas mengenai: (1) pemenuhan hukum kemitraan (*syirkah*) antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma' (2) pemenuhan rukun dan syarat kemitraan (*syirkah*) antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia; (3) mekanisme kemitraan (*syirkah*) antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

#### 4.2.1. Pemenuhan Hukum Kemitraan (*Syirkah*) antara *Driver Go-Jek* dengan PT.Go-Jek Indonesia Berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma'

Pada prinsipnya syirkah merupakan sebuah konsep yang dapat menjadi sebuah resolusi suatu permasalahan di dalam permodalan pada suatu kerjasama. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip hukum syariah, yang mencakup sebagai berikut:

##### 1) Al-Quran

Dapat dilihat dalam Al-quran pada surat An-Nisa ayat 12, dan Surat Ash-Shad ayat 24 sebagai berikut:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...” (QS. An Nisa, 4:12).

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini...” (QS. Shad, 38: 24).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

## 2) Hadits

Islam menganjurkan kita untuk dapat melakukan kemitraan dengan baik tanpa melakukan ke zaliman antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hadits-hadits berikut:

أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. {رواه أبو داود  
والحاكم عن أبي هريرة}

*"Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu". (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah).*

Imam al\_bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

*"Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Aku dan Zaid bin Arqan juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, "Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan." (HR al-Bukhari).*

Dari As-Saib Al-Makhzumi pernah meriwayatkan mengenai syirkah yang berbunyi sebagai berikut (Al-Kahlani, 1960):

*"Dari As-Saib Al-Makhzumi: bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datan pada hari*

*pembebasan kota mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Dan Ibnu Majah).*

Dalam Hadits Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan sebagai berikut (Al-Kahlani, 1960):

*“dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Saya sekutu dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.” (HR An-Nasa’i).*

Adapun hadits shohih oleh Muslim dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

*“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR. Muslim).*

### 3) Ijma’

*Ijma’* menurut ahli ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. *Ijma’* adalah suatu kesepakatan mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama (*Mujtahid*) dikalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seluruh *syirkah* yang tercakup dalam *syirkah* uqud (yaitu *syirkah* inan, *syirkah* mufawadah, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujuh) mubah/boleh hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi (Hasanudin, 2012). Menurut Imam Syafi’l

semua *syirkah* mufawadah, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujud adalah batal (tidak sah) hukumnya.

Dalam konteks *syirkah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni*, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik, mengatakan: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya." Akan tetapi berdasarkan penjabaran hukum yang dipaparkan diatas, maka secara tegas data dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam (Antonio, 2001).

Menurut Bapak Fathur selaku Ahli Fiqh, menyatakan bahwa

"para ulama melakukan kesepakatan dalam mengatur mengenai kemitraan atau *syirkah* yang dimuat di dalam fatwa DSN MUI. Maka dari itu biar kita mengetahui sesuai kah mitra yang selama ini kita jalankan, nah, DSN MUI mengenai *syirkah* dapat dijadikan acuan mengenai hal tersebut"

Sehingga untuk pedoman dalam menjalankan dan menjaga kemaslahatan dalam bermitra, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan 4 poin dari fatwa mengenai pembiayaan musyarakah dengan nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 pada tanggal 19 September 2017 di Jakarta.

#### **4.2.2. Pemenuhan Rukun dan Syarat Kemitraan antara *Driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia**

Dalam melaksanakan suatu perkongsian ataupun perserikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian



tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang wajib ketika *syirkah* itu dilaksanakan. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut Abdurahman al-Jaziri yang dikutip dalam buku fiqh muamalah rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *Sighat*, objek akad *syirkah* baik berupa modal maupun jasa. Pada umumnya rukun *syirkah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Sighat* atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Pernyataan ijab dan qabul kemitraan antara PT.Go-Jek Indonesia dan *driver* Go-Jek ditunjukkan dengan ditandatanganinya SKK (Surat Keterangan Kemitraan) dan sepakatnya para *driver* untuk menjadi mitra dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi kemaslahatan dan tujuan bersama. Sesuai dengan pendapat informan sebagai berikut,

“nanti ada surat keterangan kemitraan dan itu yang menjadi sebuah ikatan dari satu lembar surat. Setelah di verifikasi berkasnya, foto, terus aplikasinya diaktifkan dan diberikan buku pedoman” (Moh. Fathoni, *Driver*)

“...kalau mereka menandatangani itu artinya mereka ridho,..” (Fathtur Rahman, Akademisi)

- 2) Orang yang melakukan akad yaitu dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya minimal dua belah pihak bertransaksi. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, pandai dan tidak dihalangi dalam membelanjakan hartanya. Dalam hal ini pihak PT.Go-Jek Indonesia selaku perusahaan yang membuka ruang kepada masyarakat untuk bermitra dan para calon *driver* yang mendaftarkan diri selaku calon mitra dari PT.Go-Jek Indonesia. Dalam melakukan akad



kemitraan terdapat beberapa proses yang harus dilalui, seperti yang telah disebutkan oleh Informan selaku driver sebagai berikut,

“iya dari kesepakatan yang udah disepakati ngomongnya aku mitranya”  
(M.Rizky Dwi Putera, *Driver*)

“iya kan saya *drivernya* jadi kami udah menjadi mitra” (Moh. Fathoni, *Driver*)

- 3) Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. *Syirkah* merupakan suatu kerja sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para penyedia jasa. Pada dasarnya modal dapat bentuk berupa harta ataupun suatu pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui asal usul dan kepemilikannya. Dalam hal ini, pihak *driver* Go-Jek harus mengeluarkan modal dalam bentuk barang yaitu motor, dan Pihak PT.Go-Jek Indonesia pun mengeluarkan modal dalam bentuk aplikasi, server, dll

Berdasarkan perspektif syariah proses kemitraan yang dijalankan oleh pihak PT.Go-Jek Indonesia dengan mitra para *driver* sesuai dengan akad *syirkah in* yang dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin kelima nomor 2 yang menjelaskan mengenai modal usaha *syirkah* dapat berupa keterampilan/keahlian yang dimiliki tiap-tiap pihak. PT.Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang memiliki banyak hal dalam permodalan untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya misalnya, aplikasi, server, dan lain-lainnya. Sedangkan para mitra *driver* juga mengeluarkan modal berupa kendaraan yang digunakan untuk operasional, keterampilan mengemudi, keterampilan menggunakan aplikasi, dsb.
- 2) Selain mengeluarkan modal untuk kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak juga tetap bekerja sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah ditentukan pada kesepakatan diawal. Dimana para *driver* mengeluarkan kendaraan

berupa kendaraan beserta keterampilan dan bekerja dalam menjalankan beberapa fitur dari aplikasi Go-Jek seperti Go-Food, Go-Ride, Go-Send, dsb. Sedangkan PT.Go-Jek selain mengeluarkan modal yang telah disebutkan pada poin 1, PT.Go-Jek Indonesia juga melakukan pekerjaan pada porsinya yaitu, *maintenance* aplikasi, bekerja sebagai *customer service*, dsb.

- 3) Dikarenakan modal dan pekerjaan yang tidak diharuskan sama maka pembagian keuntungan pun berbeda. Hal ini ditentukan dengan pembagian 80:20 antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia. Dapat dilihat memang para *driver* sebagai tombak utama dalam kemitraan ini untuk kegiatan ini dapat berlangsung maka dari itu, pembagian yang lebih banyak diperuntukkan oleh para *driver* sebesar 80% dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia.

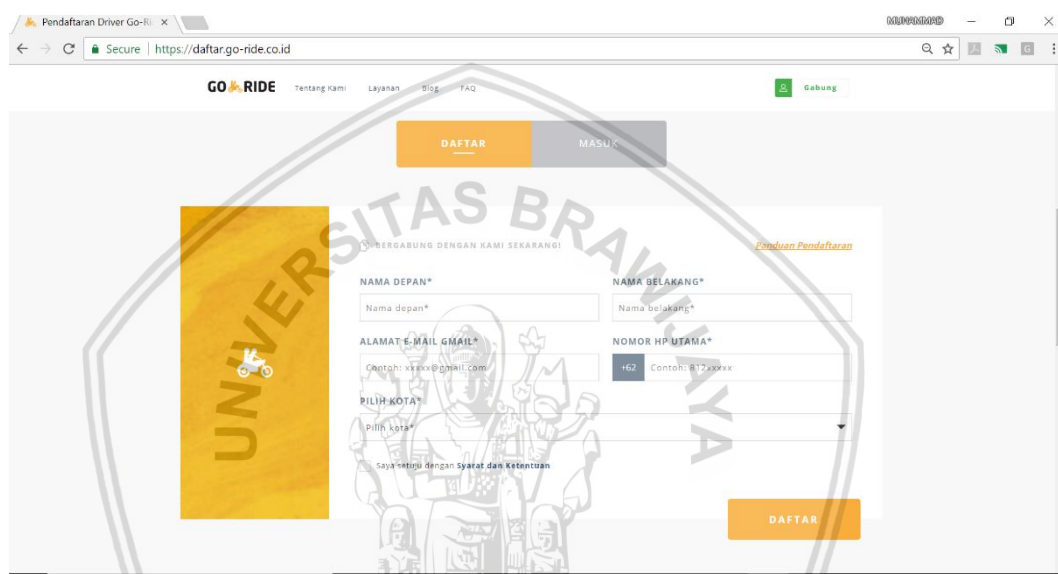
#### **4.2.3. Mekanisme Kemitraan Antara Driver Go-Jek Dengan PT.Go-Jek Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017**

PT.Go-Jek Indonesia memiliki beberapa sistematika dalam membentuk sebuah mitra kepada para *driver* yang akan bergabung didalam usahanya. Mitra yang bergabung mayoritas muslim, sehingga diperlukan pemahaman pentingnya berpegang pada prinsip syariah. Kaidah fiqh menjelaskan bahwa ujrak/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja). Untuk mengarahkan dan menjamin ke arah kemaslahatan dalam bermitra, diperlukan kesesuaian syariah pada prosesnya. Berdasarkan hasil penelitian berikut adalah proses terbentuknya kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia,

- 1) Pihak PT.Go-Jek Indonesia membuka diri untuk siapa saja yang ingin mendaftarkan diri menjadi mitra (*driver*) dan hal pertama yang harus dilakukan bagi para calon yang ingin menjadi mitra adalah mendaftarkan diri melalui website resmi PT.Go-Jek Indonesia dengan mengisi beberapa hal yang dibutuhkan pihak perusahaan untuk dapat memproses pengajuan yang

diberikan oleh calon mitra (*driver*). Diikuti dengan syarat dan ketentuan yang harus disetujui sebelum mendaftarkan diri. Selain website resmi, PT.Go-Jek Indonesia juga seringkali menyebarkan pamphlet, brosur, dan juga baliho sehingga semakin banyak pula jalur untuk mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek.

**Gambar 4.1 : Website Resmi untuk Mendaftar Menjadi Mitra Go-Jek**



The screenshot shows the Go-Ride registration page. At the top, there's a navigation bar with 'GO RIDE' and links for 'Tentang Kami', 'Layanan', 'Blog', and 'FAQ'. A 'Gabung' button is on the right. Below the navigation bar, there are two main buttons: 'DAFTAR' (orange) and 'MASUK' (grey). The main content area features a large orange banner with a motorcycle icon and the text 'DAFTAR' and 'DAFTAR'. To the right of the banner is a registration form with the following fields: 'NAMA DEPAN\*' (Name depan\*), 'NAMA BELAKANG\*' (Nama belakang\*), 'ALAMAT E-MAIL GMAIL\*' (Contoh: xxxxx@gmail.com), 'NOMOR HP UTAMA\*' (62 Contoh: 812xxxxx), and 'PILIH KOTA\*' (Pilih kota\*). There is also a checkbox for 'Saya setuju dengan syarat dan ketentuan'. A 'DAFTAR' button is at the bottom right of the form.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

- 2) Setelah perusahaan sudah menerima pengajuan untuk bermitra maka hal tersebut akan segera diolah yang pada akhir keputusannya adalah diberikannya konfirmasi kepada calon mitra (*driver*) untuk dapat melengkapi syarat-syarat untuk menjadi seorang mitra (*driver*) PT.Go-Jek Indonesia. Diantara lain syarat-syaratnya adalah:

- a. Calon mitra memperlihatkan
  - i. SMS undangan
  - ii. KTP asli
  - iii. SIM asli, dan

- iv. STNK asli
- b. Calon mitra menyerahkan
  - i. Fotocopy KTP
  - ii. Fotocopy SIM
  - iii. Fotocopy STNK
  - iv. SKCK asli
- c. Calon mitra memiliki
  - i. *Handphone* android dengan RAM minimal 1GB dan versi android 4.2
  - ii. *Simcard* dengan paket internet
  - iii. Email dengan akun GMAIL yang aktif

**Gambar 4.2 : Syarat Daftar Go-Jek**



Sumber: Observasi Peneliti, 2018

Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan mengenai proses kemitraan pada PT.Go-jek Indonesia terdapat beberapa hal yang

harus dilakukan sebelum kita resmi menjadi mitra (*driver*). Hal tersebut juga disampaikan oleh kedua informan dalam wawancara oleh peneliti:

“jadi pertama kita daftar dari situs go-jeknya dulu. Setelah itu dapat balasan dari pihak go-jek untuk sebagai bukti kalau kita sudah daftar. Terus kita ke kantornya, ambil nomor antrian nanti dipanggil oleh pihak HRDnya dan diajak ngobrol dan lengkapin berkas yang diminta SIM, STNK, SK/CK dan fotocopy segala macam...” (M.Rizky Dwi Putera, *Driver*)

“sebelum mau masuk go-jek itu aku gak tau kalau itu kemitraan atau gimana mereka bekerjanya itu aku gak tau. Dia sih bilanganya mitra tapi aku gak begitu paham kemitraan itu seperti apa. Terus proses pendaftarannya sih mereka memberitahukan melalui sms jadi ada pamphlet gitu kan go-jek Malang. Melalui sms ke nomor yang tertera di pamphlet tersebut. Setelah sms nungu ada balasan baru diundang mereka untuk verifikasi berkas. Berkasnya KTP, SIM C, SK/CK, STNK dan itu fotocopy. Terus kalau bukan dari orang malang itu mereka harus buat surat keterangan domisili kalau tinggal disini dan nanti ditunjukkan ke pihak go-jek...” (Moh. Fathoni, *driver*)

Dengan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi syarat untuk menjadi mitra (*driver*) Go-Jek Indonesia dan disertai dengan pernyataan dari para *driver* yang sudah melalui proses kemitraan. Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin ketiga mengenai *shighat* akad yang menjelaskan dua hal yaitu:

- a. akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra.
- b. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan para informan dan informasi yang didapatkan dari gambar 4.2 yang menjelaskan bahwa para calon mitra (*driver*) diharuskan untuk menyerahkan beberapa fotocopy dari KTP, STNK, SIM, dan juga SKCK asli. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin keempat mengenai ketentuan para pihak yang menjelaskan tiga hal, yaitu:



- a. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlike person*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah l'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Dengan terus memperhatikan fatwa dari DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin kelima mengenai ketentuan *ra's al-mal* (modal) tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dimana dalam poin kelima sangat erat kaitannya dengan terbangunnya sebuah kemitraan. Kembali kepada makna kata *syirkah* itu sendiri yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) maka segala bentuk barang, keterampilan, maupun materi yang akan dijadikan modal *syirkah* patut untuk diperhatikan. Sebagaimana isi dari poin kelima tersebut sebagai berikut:

- a. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
- c. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.

- e. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
- g. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- h. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Pada poin ketiga fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa, PT.Go-jek Indonesia melakukan kesepakatan/akad yang jelas, tegas, dan dapat dimengerti oleh mitra. Akad tersebut pula tertulis dan berbentuk elektronik yang dalam hal ini tidak ada ketentuan baik syariah maupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan hal tersebut dipermasalahkan. Dengan begitu, poin ketiga fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi dan tidak adanya kesalahan dalam pelaksanaannya.

Pada poin keempat fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa, PT.Go-Jek Indonesia memiliki kriteria kepada para calon mitra (*driver*) ataupun ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia. Pada nomor pertama sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mitra (*driver*) dari PT.Go-Jek Indonesia adalah berupa orang. Kecakapan hukum yang dinyatakan pada nomor 2 dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara syariah dan hukum yang berlaku. Dalam syariah Islam, seseorang sudah dapat melakukan suatu akad ketika mereka sudah dikatakan Baligh. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup dikarenakan kita hidup bernegara yang memiliki aturan yang menyebutkan seseorang dikatakan dewasa pada umur 17 tahun dan hal tersebut dibuktikan dengan



adannya KTP dan SKCK. Pada nomor ketiga yang mengatakan bahwa setiap pihak mitra harus memiliki harta ataupun *skills* yang dimiliki untuk dijadikan modal dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini pula dapat dilihat dari dua sisi yaitu selaku *driver* dan juga pihak PT.Go-Jek Indonesia. Selaku *driver*, STNK dan SIM mengindikasikan bahwa *driver* memiliki modal kendaraan dan juga keterampilan mengemudi. Sedangkan pihak Go-Jek pun memiliki aplikasi, server, asuransi, dll yang dapat dijadikan modal bermitra. Dengan hal ini pula dapat dikatakan bahwa ketentuan dan syarat yang dibuat sudah memenuhi poin keempat fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.

Pada poin kelima fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa hal-hal yang dijadikan modal untuk kegiatan *syirkah* haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang disebut pada poin kelima tersebut. Jika dilihat pada nomor 2 menjelaskan bahwa bentuk harta dapat berupa harta, keahlian, dan juga reputasi. Yang mengindikasikan bahwa di satu sisi untuk para *driver* kendaraan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan modal dalam kegiatan *syirkah* dan disisi lainnya untuk para pihak PT.Go-Jek Indonesia menjadikan aplikasi sebagai modal yang mereka *syirkah*-kan dan masih terdapat beberapa banyak hal yang dijadikan modal. Menurut hasil penelusuran yang dilakukan terhadap informan mengenai modal adalah sebagai berikut:

“yang diliat STNK aja jadi gak ada pemeriksaan bahwa itu memiliki sendiri.” (M.Rizky Dwi Putera, *driver*)

“kalau kemaren aku daftarnya pake motor pinjem nanti ditunjuhin pake stnk dan kalau bukan nama kita nanti ditanyain. Motornya ini beli sendiri, belum balik nama atau milik orang dan aku jawab ya milik orang. Tapi aku bawa ktp pemiliknya jadi gpp. Terus sebulan baru aku beli motor, baru deh aku pake motor sendiri” (Moh.Fathoni, *driver*)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk modal yang disyirkahkan oleh pihak mitra (*driver*) tidaklah harus

kepemilikan pribadi. Mengacu pada poin kelima fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 nomor 1 yang mengatakan modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian pada aspek modal yang dijadikan modal *syirkah*. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan saat wawancara sebagai berikut:

“tidak harus (tidak harus milik sendiri, tetapi pemakaian itu sah. contoh, kalau dia menggunakan motor sendiri maka tidak ada masalah, kalau dia nyicil gimana? Boleh, artinya itu motornya sendiri. Kalau dia pinjam, dan itu memang sudah di izinkan untuk melakukan usaha Go-Jek maka itu diperbolehkan. bahkan ketika motor gadai itu diperbolehkan asal izin ke orang yang menggadaikan.” (Anas Budiarto, akademisi)

Dengan didukung oleh fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dan juga hasil temuan yang didapatkan dari para informan. Maka ha tersebut memberikan penjelasan terhadap modal yang dilakukan sejauh ini oleh pihak *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia sudah mengikuti prinsip syariah yang telah disepakati bersama.

- 3) Setelah persyaratan-persyaratan dari mitra (*driver*) sudah terpenuhi maka para mitra (*driver*) akan diberikan Surat Keterangan Kemitraan (SKK) yang ditanda tangani yang menandakan bahwa *driver* Go-Jek resmi menjadi mitra PT.Go-Jek Indonesia. Setelah menanda tangani SKK para *driver* akan difoto dan dijelaskan mengenai cicilan jaket dan helm, aplikasi dan zona-zona aman untuk beroperasi. Lalu para *driver* juga harus mengaktifkan Go-pay di CIMB NIAGA dengan minimal deposit lima puluh ribu. Setelah itu para *driver* sudah dapat menarik para penumpang.



berhenti dari go-jek itu minta dikembalikan. Tapi yo, mana ada yang mau kembalikan. Dan setelah ngembalikan jaket uang itu gak dikembalikan. Kalau udah lunas sebenarnya jadi hak milik kan ya karna udah dibeli..” (Moh. Fathoni, *driver*)

Terdapat hal yang dikeluhkan oleh para *driver* Go-Jek mengenai SKK tersebut yaitu, terdapat kalimat yang mengatakan bahwa atribut jaket dan helm yang harus dicicil dari pemotongan deposit saldo *driver* meskipun sudah dibayar lunas ketika para *driver* sudah tidak lagi menjadi mitra atau berakhirnya mitra antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia maka atribut jaket dan helm akan selalu menjadi hak dan milik PT.Go-Jek Indonesia. Berikut hasil wawancara terhadap informan mengenai fenomena tersebut:

“nah ini tidak boleh.. Kecuali ketika para *driver* mengembalikan ke perusahaan kemudian diganti dengan harga pasar atau harga kompensasi atau harga kesepakatan bersama ketika akad. Karena itu sudah menjadi hak milik, itu namanya mengambil hak orang secara batil yang termasuk didalam surat an-nisa ayat 29. Maka skema dalam pengembalian atribut ini harus diganti dalam hal yang lebih baik menurut syariah karena hal ini tidak bisa dibenarkan dalam kaidah fiqh manapun. Memang nama baik dalam islam itu boleh dijaga dan memang harus dijaga maka skema tersebut perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi” (Anas Budiarto, Akademisi)

“...pada persyaratan itu mengatakan “harus” mengembalikan maka itu tidak boleh. Karena yang namanya akad membeli, ketika barang itu dijual dan sudah dibeli maka barang itu sudah menjadi hak pemilik pembeli jadi tidak ada urusan lagi dengan penjual.” (Fathur Rahman, Akademisi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki dari SKK yang menjadi landasan kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-jek Indonesia. Dimana SKK adalah hal yang fundamental didalam terbentuknya akad kemitraan. Jika dilihat dari dua sudut pandang yaitu, dari sudut pandang hukum perundang-undangan dan hukum syariah. Pada hukum perundang-undangan hal tersebut bukan menjadi suatu perkara yang dianggap salah. Karena, ketika *driver* sudah menandatangani SKK tersebut dapat diartikan bahwa *driver* tersebut sudah mengetahui dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Berbeda

halnya dengan hukum syariah, dimana pada hukum syariah terdapat aturan dan kaidah-kaidah fiqh yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Karena dalam prinsip syariah, kemaslahatan masing-masing pihak merupakan hal yang penting untuk dijaga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pula adalah kesetaraan dalam membentuk sebuah kemitraan, terdapat beberapa stigma dimasyarakat yang menganggap bahwa *driver* Go-Jek selaku pekerja. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan tidak adanya suara yang diberikan kepada pihak *driver* untuk bernegosiasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“...akadnya itu mereka bilangya kalau udah gak jadi mitranya ya dikembalikan. Ya mereka udah buat syarat secara sepihak jadi gak ada tawar menawar. Kalau mau jadi mitra ya ikutin persyaratan kalau enggak yaudah.” (Moh.Fathoni,*driver*)

“sejatinya dalam mitra itu posisinya tidak ada atasan dan bawahan, tidak ad bos dan karyawan karena ini mitra. Kecuali ijarah, kalau ijarah dibayar” (Anas Budiarto, Akademisi)

Hal tersebut menjadi sebuah pandangan baru untuk masyarakat, dan juga perusahaan untuk terus memperbaiki dan memberikan inovasi-inovasi terhadap regulasi yang menjunjung kemaslahatan dan juga memberikan manfaat terhadap lingkungan hidup sekitar. Akan tetapi, meskipun terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahwa hal tersebut memberatkan sebelah pihak (*driver*) jika fenomena ini dilihat dari sudut pandang pihak lainnya (PT.Go-Jek Indonesia) hal tersebut juga memiliki landasan yang menjadikan hal tersebut terjadi sekarang ini. Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu informan peneliti yang menyatakan hal sebagai berikut:

“...Lalu bagaimana ketika akad tidak ada celah untuk bernegosiasi? Seharusnya didalam fiqh itu memang harus ada yang namanya kesepakatan bersama dengan adanya negosiasi didalamnya. Akan tetapi, fiqh itu kan luas mas ada yang namanya ‘urf yang artinya tradisi



yang boleh dilegalkan menjadi hukum syariatnya dia ('urf) tidak berlawanan dengan syariah kemudian dia ('urf) bersifat umum dan berlaku terus menerus. Sebagai contoh dulu saya pernah melakukan mudharabah dengan bank syariah yang disana saya tidak dapat bernegosiasi dan sudah ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 49%:51% oleh bank. Itulah contoh 'urf karna memang biasanya bank yang mempunyai kalkulasi finansial yang kuat, analisis yang baik dan seterusnya. Sedangkan kita tidak punya skill tersebut nah, itulah yang disebut 'urf untuk kebaikan bersama. jika bank mengalami kerugian maka kita selaku masyarakat pula yang kena imbasnya. Jadi mereka yang bisa kalkulasikan hal tersebut. Apalagi seorang ojek yang tidak punya skill tersebut nah hal itu lah yang menyebabkan dizaman ini akad syariah diikuti dengan 'urf atau tradisi yang sesuai syariah. Insya'allah walaupun kaidah aslinya harus adanya negosiasi akan tetapi dengan adanya tradisi yang tidak menyalahi syariah diperbolehkan." (Anas Budiarto, 2018)

Dengan pernyataan tersebut yang menjelaskan pula kaidah fiqh 'urf yang dapat diartikan dengan tradisi yang sesuai syariah maka suatu akad yang didasari dengan ketentuan sebelah pihak bukan berarti dapat dikatakan itu tidak benar. Terlebih lagi penjelasan yang diberikan oleh informan adalah logika yang dapat diterima dengan rasionalisasi mengenai skill tiap individu yang berbeda maka proporsi kerja yang dapat ditanggung masing-masing individu pun berbeda pula.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin ketujuh yang berisikan aturan-aturan yang mengatur mengenai kegiatan usaha yang harus dipenuhi dalam kegiatannya. Poin ketujuh nomor 1 yang berbunyi, "usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka dari hal ini terdapat ketidaksesuaian antara fatwa dengan pengimplementasian dari kegiatan kontrak yang dilakukan. Maka dari itu perbaikan dalam hal kontrak yang telah disebutkan dirasa sangat perlu demi menjaga kebaikan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *driver* menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang terjalin antara *driver* dengan PT.Go-Jek

Indonesia akan berakhir ketika para *driver* melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang tertera di dalam aplikasi Go-Jek dan salah satunya adalah tidak mengaktifkan aplikasi selama 1 bulan. Berikut pernyataan salah satu informan selaku *driver* PT.Go-Jek Indonesia:

“itu kalau kita melanggar peraturan kayak fake order, dll. Tp sepengetahuanku maksimal kalau sebulan gak narik itu akan di non-aktifkan. Karna kan ya gak aktif. Ya jadi kalau gak mau non-aktif ya minimal dapet 1 order.” (Moh. Fathoni, 2018)

Dalam syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi Go-Jek juga menerangkan bahwa terdapat bonus atau biasa dikenal sebagai *performing fee* yang akan didapatkan oleh *driver* ketika melakukan beberapa pekerjaan yang ditawarkan untuk mendapatkan bonus/insentif atas kerja kerasnya. Hal ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ahli fikih menggunakan quran surat Al-Qashash (28): 26-27:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَبَأْبَتِ اسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ

Artinya: “(26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (27) Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka



*aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"*

Para ahli fikih menjelaskan bahwa dari dalil tersebut menganalogikan suatu kontrak kerja yang dilakukan para kedua belah pihak antara nabi Syu'aib dengan Musa A.S. dimana dalam kontrak tersebut mengatakan bahwa Musa bekerja selama 8 tahun akan tetapi nabi Syu'aib akan memberikan "bonus" jikalau Musa bekerja lagi selama 10 tahun yaitu dapat menikahi salah satu anak nabi Syu'aib. Atas dasar hal inilah bonus/insentif atau yang bisa disebut *performing fee* tidak menjadi masalah dalam kemitraan Go-Jek ini.

- 4) Setelah *driver* resmi menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia, para *driver* sudah bisa memulai menerima *order* mengatasnamakan Go-Jek yang langsung didapatkan melalui aplikasi Go-Jek. Setiap *driver* menerima *order* dan menyelesaikan *order* yang diterima maka secara otomatis pendapatan tersebut akan dibagi hasilnya dengan PT.Go-jek Indonesia dengan perbandingan 80% untuk *driver* dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia.

Dari hasil observasi terhadap *driver* Go-Jek yang beroperasi di wilayah Malang dan sekitarnya. Menunjukkan bahwa, seorang *driver* yang sudah resmi menjadi mitra PT.Go-Jek Indonesia memiliki izin untuk melakukan usaha mengatasnamakan entitas *syirkah* yaitu dengan atribut helm beserta jaket Go-Jek Indonesia. Hal tersebut dijelaskan pada pernyataan Bapak Anas Budiarto sebagai berikut:

"...bahwa setiap pihak boleh melakukan kegiatan atas nama *syirkahnya* akan tetapi tetap memperhatikan kepentingan pihak yang lain misalnya kita tidak boleh membuka rahasia perusahaan, dll. Akan tetapi kita boleh melakukan kontrak atas nama *syirkah* kita. Kalau didalam konvensional, pihak yang dapat mengganti nama *syirkah*, berhak menentukan pimpinan itu dilakukan oleh pihak yang memiliki saham terbesar tapi kalau didalam Islam melalui musyawarah tidak ada yang memiliki hak lebih untuk menentukan segalanya..."

Temuan ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin ketujuh mengenai ketentuan kegiatan usaha. Dimana terdapat beberapa hal yang termuat didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.
- c. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- d. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *al-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa selaku mitra (*driver*) dapat melakukan usaha *syirkah* dengan menggunakan entitas *syirkah* yaitu atribut Go-Jek dan nama baik Go-Jek. Dalam hal ini pula, dapat diketahui bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek selaku mitra dari PT.Go-Jek Indonesia sudah memenuhi ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang menyatakan hal serupa mengenai nisbah bagi hasil dengan mekanisme yang dijalankan oleh PT.Go-Jek Indonesia terhadap mitranya (*driver*) yang berbunyi sebagai berikut:

“*Fair sih menurutku 80:20.*” (M.Rizky Dwi Putera, *driver*)

Menurut fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin keenam yang menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan nisbah bagi hasil. Beberapa hal yang termuat didalam poin adalah tersebut sebagai berikut:

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan
- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu
- e. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah(berjenjang/*tiering*).
- f. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Pada poin keenam membuktikan bahwa PT.Go-Jek Indonesia sudah sesuai akan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 dengan menggunakan sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak mitra (*driver*) dengan PT.Go-Jek Indonesia adalah nisbah-kesepakatan. Pernyataan nisbah bagi hasil antara mitra (*driver*) dengan PT.Go-Jek Indonesia tercantum didalam ketentuan yang ada di dalam aplikasi Go-Jek. Untuk poin keenam nomor enam yang menyatakan bahwa nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan sejauh ini belum pernah terjadi untuk personal ke personal. Dikarenakan PT.Go-Jek Indonesia memiliki ribuan mitra (*driver*) diberbagai kota. Asalkan nisbah-kesepakatan yang

ditentukan tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut masih diperbolehkan. Maka dari itu, untuk poin keenam mengenai ketentuan Nisbah Bagi Hasil antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017

- 5) Selama melakukan kegiatan *syirkah* tidak jarang beberapa *driver* mengalami kerugian yang dikarenakan *fake order*, kecelakaan, dll. maka hal tersebut juga akan dibagi *profit loss sharing* dengan PT.Go-Jek Indonesia

**Gambar 4.4 : Kartu Go-protect Go-Jek**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Menurut pernyataan dari informan, terdapat skema dalam hal penanggulangan kerugian yang terjadi tanpa disengaja. Semisal terjadi *fake order*, maupun kecelakaan. Berikut pernyataan para informan:

“kemaren sih bilangny gini, misal motor hilang dicuri. Nanti go-protect bisa ngeclaim tp harus ada surat dari kepolisian. Dan seingetku dapet

2.5jt. yaa buat dp motor lagilah hahaha. Go-protect itu bayarnya lima belas ribu per bulan.” (Moh.Fathoni, *driver*)

“Kalau kecelakaan itu ada asuransinya dari go-jek. Kalau fake order tinggal dibawa ke kantor. Nanti claim penipuan. Jadi uangnya dikembalikan dari go-jeknya.” (M.Rizky Dwi Putera, *driver*)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukakn oleh *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia menggunakan skema *profit loss sharing*. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang dikutip oleh Bank Indonesia bahwa *syirkah* atau *musyarakah* adalah saling bekerja sama, berserikat, berkongsi, bermitra (*cooperation, partnership*); pembiayaan dilakukan berdasarkan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memiliki andil dalam modal dengan ketentuan bahwa *profit* yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Begitu pula dengan kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Meninjau pernyataan dari informan yang dikaitkan pada poin kedelapan dalam fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 yang memuat mengenai ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya. Berikut isi dari fatwa tersebut:

- a. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*
- b. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.



- c. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagi sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- e. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- f. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

Temuan ini membuktikan bahwa dalam kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia memakai sistem *profit loss sharing* yang dimana ketika para *driver* mengalami kerugian baik itu dalam hal pesanan palsu maupun kecelakaan, terdapat beberapa skema yang sudah disiapkan oleh pihak management untuk menanggulangi hal tersebut. Hal ini memiliki kesesuaian pada poin kedelapan nomor 5 yang menjelaskan mengenai kerugian. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat kesesuaian praktik penanggulangan kerugian yang dilakukan Go-Jek dengan ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

#### **4.3. Ringkasan Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan (*Syirkah*) antara *Driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia**

Pada ringkasan analisis kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia didapatkan dari hasil pada pembahasan sebelumnya. Dengan menjelaskan hubungan antara poin

kesesuaian prinsip syariah pada setiap tahapannya, teori atau konsep kemitraan (*syirkah*), hasil temuan, dan menginterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan yang akan diuraikan menurut pandangan kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan dalam setiap tahapan, diantaranya rukun dan syarat *syirkah*, tahap open join venture mitra, tahap pemenuhan berkas, tahap kontrak, tahap asset dan nisbah bagi hasil, dan tahap penanggulangan kerugian. Selanjutnya dihubungkan dengan teori yang ada yaitu pada poin rukun dan syarat *syirkah* dengan pemenuhan teori atau konsep rukun dan syarat *syirkah*, sedangkan tahap proses kemitraan berdasarkan kesesuaian fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil temuan yang didapatkan dari lapangan beserta informan yang menunjukkan fakta dan terdapat kesesuaian dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya dan menjelaskan tentang proses kemitraan (*syirkah*) yang telah diterapkan untuk dapat memberikan gambaran atau menjelaskan hasil temuan secara lebih jelas.

Dengan menghubungkan antara teori atau konsep *syirkah* yang dilakukan oleh PT.Go-Jek Indonesia dengan melihat mekanisme serta proses kemitraan di lapangan, akan memberikan hasil temuan dan menginterpretasikan sehingga diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini. Agar lebih memudahkan pembaca ringkasan analisis dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:



**Tabel 4.2 : Ringkasan Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan (*Syirkah*) antara *Driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia**

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
1	Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	<p>a. Pada umumnya rukun <i>syirkah</i> ada tiga yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sighat atau ijab qabul</li> <li>2) Adanya orang yang melakukan akad</li> <li>3) Objek akad yaitu modal dan bentuk kerja</li> </ol>	<p>a. Rukun dan syarat dalam akad <i>syirkah</i> yang ada pada kemitraan antara <i>driver</i> Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia telah terpenuhi karena adanya 3 poin yang menjadi landasan bermitra yaitu adanya sighat atau ijab qabul, adanya orang yang melakukan akad, dan adanya objek akad yang di <i>syirkah</i>-kan</p>	<p>a. Terdapatnya ijab dan qabul yang ditandai dengan tanda tangan pada Surat Keterangan Kemitraan (SKK). Adanya orang yang melakukan akad yaitu pihak mitra (<i>driver</i>) dan pihak PT.Go-Jek Indonesia. Objek yang di akad-kan untuk menjadi modal dari pihak mitra (<i>driver</i>) berupa kendaraan dan juga keterampilan berkendara. Sedangkan pada pihak PT.Go-Jek Indonesia memberikan</p>	<p>Pada rukun dan syarat <i>syirkah</i> dalam kemitraan PT.Go-Jek Indonesia dengan <i>driver</i> Go-Jek sudah terpenuhi dengan baik</p>

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				aplikasi sebagai modal serta akses kepada penumpang untuk para mitra yang bergabung	
2	Tahap Open joint venture mitra	Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12, dan surat Ash-Shad ayat 24 yang intinya bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan kemitraan dan tidak berbuat zalm terhadap sesamanya	Pembukaan open joint venture mitra dari berbagai media a. Website b. Pamphlet c. Baliho, dll	Dalam tahap ini merupakan tahap awal untuk PT.Go-Jek Indonesia melakukan kemitraan dengan calon mitra yang harus mengajukan diri kepada perusahaan untuk dapat diolah datanya dan di konfirmasi untuk dapat melanjutkan tahap selanjutnya	Pada tahap ini belum terjadi kontak dengan calon mitra secara langsung dan masih dapat dikatakan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang ada.
3	Tahap Pemenuhan Berkas	a. Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin	Terdapat syarat-syarat untuk menjadi mitra ( <i>driver</i> ) yang didalamnya terdapat beberapa hal	a. Akad <i>syirkah</i> dilakukan oleh pihak PT.Go-Jek Indonesia dengan memberikan aturan dan	Pada tahap ini merupakan tahap pengecekan dan juga pemenuhan seorang calon mitra ( <i>driver</i> ) dari segi

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah Syirkah	Teori/Konsep Kemitraan(Syirkah)	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
		<p>ketiga mengenai ketentuan sighat akad</p> <p>b. Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin keempat mengenai ketentuan para pihak yang melakukan akad</p> <p>c. Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin kelima mengenai ketentuan <i>ra's al-mal</i> (modal)</p>	<p>penting dalam suatu akad, yaitu</p> <p>a. Terdapat akad syirkah yang menyatakan dengan jelas, tertulis serta diterima oleh para mitra</p> <p>b. Terdapat ketentuan para pihak (Subyek)</p> <p>c. Terdapat modal yang disyirkah-kan</p>	<p>syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra (<i>driver</i>) yang secara jelas dan tertulis seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2</p> <p>b. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh calon mitra dengan membuktikan kompetensi individu dan dapat dinyatakan sudah cakap hukum dan memiliki kemampuan yang ditandai dengan adanya KTP dan SIM</p> <p>c. Sesuatu yang dijadikan modal oleh kedua belah</p>	<p>kecakapan hukum, kemampuan dan juga mengenai modal yang akan disyirkah-kan dan sejauh ini pengaplikasian akad tertulis, ketentuan subyek, dan juga modal sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017</p>

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah Syirkah	Teori/Konsep Kemitraan(Syirkah)	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>pihak untuk menjadi dasar dalam kemitraan.</p> <p>kendaraan dan keterampilan mengemudi merupakan modal yang diberikan dari pihak <i>driver</i> sedangkan teknologi (aplikasi) maupun akses terhadap para konsumen menjadi modal yang diberikan oleh pihak PT.Go-Jek Indonesia</p>	
4	Tahap Kontrak	<p>Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin ketujuh yang menjelaskan mengenai ketentuan kegiatan usaha nomor 1 yang mengatakan</p>	<p>a. Terdapat Surat Keterangan Kemitraan (SKK) yang menjadi ikatan kemitraan antara</p>	<p>a. Setelah semua berkas sebelumnya sudah terpenuhi maka para calon mitra (<i>driver</i>) diberikan SKK sebagai tanda bahwa <i>driver</i></p>	<p>Dalam kontrak yang dilakukan antara <i>driver</i> dengan PT.Go-Jek Indonesia terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dikarenakan berdasarkan</p>

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
		<p>setiap usaha yang dilakukan <i>syarik</i> (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><i>driver</i> dengan PT.Go-Jek Indonesia</p> <p>b. Ketentuan untuk mengembalikan atribut Go-Jek yang sudah dicicil ketika sudah tidak menjadi mitra</p> <p>c. Tidak adanya kemampuan untuk bernegosiasi dengan aturan yang sudah dibuat</p>	<p>tersebut resmi menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia. Dimana didalam SKK terdiri dari biodata mitra beserta penjelasan mengenai cicilan atribut Go-Jek</p> <p>b. Pada SKK tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa ketika para <i>driver</i> yang sudah tidak menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia harus mengembalikan atribut yang sudah dicicil baik itu sudah lunas maupun belum lunas. Karena pada SKK</p>	<p>hukum syariah terdapat hal yang batil dari kontrak khususnya mengenai diharuskannya pengembalian atribut tanpa adanya kompensasi dari PT.Go-Jek Indonesia. Kemudian, tidak adanya negosiasi didalam kemitraan yang dijalankan masih tetap berada didalam hukum syariah yaitu 'urf maka hal tersebut diperbolehkan.</p>

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah Syirkah	Teori/Konsep Kemitraan(Syirkah)	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>tersebut menyatakan segala bentuk atribut Go-Jek akan selalu menjadi milik Go-Jek</p> <p>c. Dalam melakukan suatu akad kerjasama, sejatinya mitra memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya dan memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan yang akan dibuat. Akan tetapi hal tersebut tidak terdapat didalam kemitraan PT.Go-Jek Indonesia. Tidak adanya hal tersebut bukan berarti menyalahi aturan syariah</p>	



No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				karna didalam kaidah fiqh ada yang disebut dengan 'urf yaitu tradisi yang tidak menentang prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku.	
5	Tahap Aset dan Nisbah Bagi Hasil	a. Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin ketujuh yang menjelaskan mengenai kegiatan usaha nomor 2 yang mengatakan dalam melakukan usah <i>syirkah</i> harus atas nama entitas <i>syirkah</i> , tidak boleh atas nama diri sendiri	a. <i>driver</i> selalu mengatasnamakan Go-Jek b. Pembagian keuntungan yang diterapkan adalah sebesar 80:20	a. Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan <i>syirkah</i> maka tiap mitra harus mengatasnamakan entitas <i>syirkah</i> yang dalam hal ini yaitu Go-Jek b. Pembagian nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak <i>driver</i> dengan PT.Go-Jek Indonesia adalah sebesar 80%	Pada tahap ini menjelaskan bahwa mitra harus selalu menggunakan entitas <i>syirkah</i> apapun yang terjadi ketika sedang melakukan kegiatan <i>syirkah</i> dan pembagian hasil yang didapatkan kedua belah pihak telah disepakati kedua belah pihak dengan rasio 80% untuk <i>driver</i> dan

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
		b. Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin keenam yang menjelaskan mengenai ketentuan nisbah bagi hasil		untuk <i>driver</i> dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia yang telah tertulis didalam peraturan di aplikasi Go-Jek	20% untuk PT.Go0jek Indonesia
6	Tahap Penanggulangan Kerugian	Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan mengenai ketentuang keuntungan, kerugian dan pembagiannya nomor 5 yang mengatakan bahwa kerugian usaha <i>syirkah</i> wajib ditanggung (menjadi beban para <i>syarik</i> secara proporsional sesuai dengan	a. Terdapat skema claim b. Terdapat skema asuransi dari PT.Go-Jek Indoneia	a. Banyak para <i>driver</i> mengalami kerugian diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meng- <i>cancel</i> pesanan dan bahkan ada beberapa fenomena yang hanya ingin menjahili para <i>driver</i> dengan memesan Go-Jek akan tetapi memberikan	Kesimpulan dari tahap ini adalah adanya <i>loss sharing</i> terhadap kedua belah pihak yang melakukan akad <i>syirkah</i> dan hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan juga peraturan perundang-undangan

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
		porsi modal usaha yang disertakannya		<p>alamat yang salah ataupun memesan makanan akan tetapi dalam prosesnya konsumen meng-<i>cancel</i> pesanan sehingga membuat rugi para <i>driver</i>. Akan tetapi hal tersebut sudah <i>dibackup</i> oleh skema untuk mengklaim kerugian jika <i>fake order</i> khususnya pada fitur Go-Food</p> <p>b. Selaku mitra sudah selayaknya mendapatkan keuntungan bersama dan kerugian bersama. ketika para <i>driver</i> mengalami</p>	

No.	Kesesuaian Prinsip Syariah <i>Syirkah</i>	Teori/Konsep Kemitraan( <i>Syirkah</i> )	Temuan	Interpretasi	Kesimpulan
				<p>musibah seperti kecelakaan dalam melaksanakan kegiatan <i>syirkah</i> maka hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak PT.Go-Jek Indonesia dengan adanya Go-Protect dan juga asuransi BPJS</p>	

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan uraian pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan *driver* Go-Jek dengan PT.Go.Jek Indonesia. Lebih lanjut hasil penelitian ini membawa pada beberapa kesimpulan yakni:

1. Dalam melakukan kegiatannya, *driver* Go-Jek memiliki status kemitraan dengan PT.Go-Jek Indonesia yang dalam kaidah Islam dapat digolongkan menjadi akad *syirkah* (kemitraan). Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad kemitraan yaitu, adanya ijab qabul, orang yang berakad, dan objek yang menjadi modal *syirkah*. Ketiga poin tersebut sudah terpenuhi dalam praktik kemitraan yang telah dilakukan oleh *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia.
2. Proses calon mitra (*driver*) untuk mengajukan diri yang terdapat pada poin Surat Keterangan Kemitraan (SKK) memiliki ketidaksesuaian dalam sudut pandang kaidah fiqh syariah. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak (*driver*) dan berdasarkan kaidah fiqh hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah serta sejatinya didalam melakukan akad *syirkah* terdapat negosiasi di dalamnya. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena adanya kaidah 'urf yaitu tradisi yang tidak menentang syariah dan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan akad kemitraan yang dilakukan oleh *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia secara keseluruhan memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *syirkah*.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Khususnya mengenai pengembalian atribut Go-Jek ketika berakhirnya kemitraan. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang ada. beberapa skema yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal tersebut dapat berupa merubah sistem pengembalian dengan adanya kompensasi dari PT.Go-Jek kepada para *driver* atau dengan skema *buyback* dengan harga yang sudah disepakati diawal.
2. Perlu adanya ruang untuk para mitra (*driver*) agar dapat menyuarakan pendapat baik mengenai nisbah bagi hasil ataupun ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam melaksanakan kemitraan. karena sejatinya kedudukan mitra adalah setara.
3. Pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para *driver* dari adanya *fake order*. Maka dari itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam menjaga sistem agar tetap aman.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996). H 1510.

Abdurrauf, Muslim Ibrahim. 1983. *Madharyiah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaram*. Kairo. Kuliyah Syari'ah Qanun Al Azhar.

Adi, Wijaya. 2011. *Pengangguran*. Wartawarga.gunadarma.ac.id diakses tanggal 12 Januari 2018.

Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo. Media Zikir

Al-Fauzan, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan. 2005. *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Solo. Media Zikir.

An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis* (terjemahan). Ull Press, Yogyakarta. Cetakan Kedua.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Pers.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta. Maktabah Al-Hanif.

Bakrin bin Muhammad, Imam Taqyudin Abi. 1992. *Kifayatul Akhyar*. Semarang. CV. Toha Putra.

Buhal. 2000. *Visi Iptek memasuki millennium III*. Jakarta: UI Press

Chapra, M.U.1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Risalah Gusti, Surabaya.

Clarke III, I. 2001. Emerging Value Proporsitions for m-commerce. *Journal of Business Strategies*, vol.18, Ed.2, pp:133-148

Dahlan, Abdul Azis. 1992. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Houve.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Farin, N.J., Rimon, M. N. A. A., Momen, S., Uddin, M.S., & Mansoor, N. 2016. A framework for dynamic vehicle pooling and ride-sharing system. *In Computational Intelligence (IWCI), International Workshop on pp: 204-208*. IEEE.

Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Prenada Media Grup.

PT.Go-Jek Indonesia. Diakses dari <https://www.go-jek.com/about/> pada 11 Maret 2018

Harisman. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariaah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 50.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama.

Hasanudin, Maulana. 2012. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Himpunan fatwa DSN MUI, No. 08/DSN-MUI/IV/2000 di akses pada, 6 Februari 2018
- Irianto, Heru dan Yuniawan Hidayat. 2016. *Panduan Pendirian Usaha: Pengembangan Aplikasi Digital*. Semarang. BEKRAF
- Mahmudahningtyas, Arrum. 2015. Analisis Kesejahteraan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*. Vol.3, No. 1.
- Majid, Abdul. 1986. *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Mardalis, Ahmad dan Nur Hasanah. 2016. Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Falah* Vol. 1, No. 1, pp 30-37
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: prenada Media.
- Mas'adi, Ghufon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. AMZAH.
- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia.
- Negroponte, Nicholas. 1995. *Being Digital*. United States. Vintage Books.
- Putera, Prakoso Bhairawa. 2015. *Iptek dan Inovasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium* Vol. 5 No.9, pp. 1-8
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut. Dar Al-Fikr..
- . 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta. Pena Pundi Aksara.
- Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (1998) *Economics*, The McGraw-Hill Companies, Inc., Singapore.
- Spieth, P., Schneckenberg, D., Ricart, J.E., 2014. Business Model Innovation – State of the Art and Future Challenges for the Field. *RD Manag*. Vol.44 Ed.3, pp:237-247.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), H.285
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada.
- Syafe'I, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009. H 59
- Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith. 2008. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Ustadiyanto, Riyeke. 2001. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

- Wallsten, S. 2015. The competitive effects of the sharing economy: how is Uber changing taxis. *Technologi Policy Institute*, Vol.22.
- Watanabe, C., Naveed, K., & Neittaanmaki, P. 2016. Co-evolution of three mega-trends nurturesun-captured GDP-Uber's ride-sharing revolution Technology in Society. *Vol.46*, pp:164-185.
- Wisana, Dewa G.,K. dkk. 2017. *Dampak GO-JEK Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Yogaswara, Endrico. 2014. *Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Online Banking, Overall Online Banking Service Quality, Terhadap Costumer Satisfaction*
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syariah*. Jakarta. Robbani press.
- Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya'ban. 1965. *Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma'tbaah wa At-Taklif*. Mesir. 1965
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus. Dar Al-Fikr.
- Zulganev. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

### AKAD SYIRKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *syirkah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
  - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *syirkah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Syirkah* untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
- 1. Firman Allah SWT:
    - a. Q.S. Shad (38): 24:
 

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini ....”
    - b. Q.S. Al-Maidah (5): 1:
 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ....”

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.





“Allah SWT berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka’.”

- b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdilllah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
4. Ijma’ ulama atas bolehnya musyarakah.
5. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
  2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
  3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD SYIRKAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

1. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

- secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.
2. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
  3. *Ra's al-mal* (رأس المال) adalah modal usaha berupa harta kekayaan (مال-أموال) yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
  4. *Syirkah amwal* (شركة الأموال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan (مال-أموال) dalam bentuk uang atau barang.
  5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* (شركة الأبدان-شركة الأعمال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
  6. *Syirkah wujuh* (شركة الوجوه) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
  7. *Taqwim al-'urudh* (تقويم العروض) adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
  8. Nisbah bagi hasil - dapat juga disingkat **nisbah** - adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
  9. Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
  10. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
  11. *Syirkah da'imah* (الشركة الدائمة) atau *syirkah tsabitah* (الشركة الثابتة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'qqatah*-الشركة المؤقتة) maupun tidak dibatasi.
  12. *Musyarakah mutanaqishah* (المشاركة المتناقصة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.



14. Kerugian usaha (*al-khasarah*-الخسارة) *musyarakah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
15. *At-ta'addi* (التعدي) adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
16. *At-taqshir* (التقصير) adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
17. *Mukhalafat asy-syuruth* (مخالفة الشروط) adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

**Kedua : Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah**

*Syirkah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

1. *Syirkah mu'qqatah*.
2. *Syirkah da'imah*.
3. *Musyarakah mutanaqishah*.
4. *Syirkah amwal*.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
6. *Syirkah wujuh*.

**Ketiga : Ketentuan Shighat Akad**

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keempat : Ketentuan Para Pihak**

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

**Kelima : Ketentuan Ra's Al-Mal**

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

**Keenam****: Ketentuan Nisbah Bagi Hasil**

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/*tiering*).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

**Ketujuh****: Ketentuan Kegiatan Usaha**

1. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.



4. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
5. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

**Kedelapan : Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya**

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

**Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk**

1. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
2. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
3. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

4. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

**Kesepuluh : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H  
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G